

SKRIPSI



KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBERITAAN MEDIA MASSA

**OLEH
ERNAWATI
B 111 09 038**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

HALAMAN JUDUL

**Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa
Pemberitaan Media Massa**

**Oleh
ERNAWATI
NIM B 111 09 038**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada
Bagian Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

**PENGESAHAN SKRIPSI
(SKRIPSI)**

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA PEMBERITAAN MEDIA MASSA**

Disusun dan diajukan oleh:

**ERNAWATI
NIM B 111 09 038**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari,
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
Nip.196408241991032002

Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H
Nip.195606071985031001

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ERNAWATI

Nomor Pokok : B111 09 038

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam
Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 3 Februari 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
Nip.196408241991032002

Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H
Nip.195606071985031001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ERNAWATI

Nomor Pokok : B111 09 038

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam
Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 3 Februari 2014

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Ernawati (B11109038), *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa*, dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.** (selaku Pembimbing I) dan **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** (selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan media massa dan sejauh mana fungsi Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan media massa. Dimana dalam aturan tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. aturan tersebut menjadi payung hukum bagi Dewan Pers dan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Adapun sumber data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan yakni, teknik deskriptif kualitatif. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa media massa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Kemudian untuk menjalankan fungsinya, Dewan Pers menerima seluruh pengaduan baik itu dari masyarakat, pemerintah, maupun pers itu sendiri, lalu mempelajari pengaduan yang diterimanya dan menyelesaikannya melalui mekanisme mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang dihasilkan melalui rapat pleno Dewan Pers.

Adapun hambatan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan media massa, si pengadu setelah mengadukan masalahnya terkadang, bersikap kurang kooperatif terhadap Dewan Pers. Laporan atau pengaduan yang disampaikan ke dewan pers melalui Komisi Pengaduan Dewan Pers ternyata telah dilaporkan ke polisi, atau kasus tersebut telah di ajukan ke pengadilan. Kurangnya pemahaman pengadu terhadap pesan-pesan media massa, menimbulkan kesalahpahaman antara pihak yang bersengketa ketika proses mediasi berlangsung.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan limpahan kasih sayang-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa”*** tepat waktu. Dialah Allah Sang Pemberi Wujud, cahaya di atas cahaya, yang senantiasa memberikan cinta kepada setiap makhluk. Dialah yang maha pemberi, Dialah yang maha pengasih, Dialah pemilik segala yang dimiliki. Dialah yang esa, yang dengan keesaanNya membagikan kasihNya. Puji Syukur atas semua nikmatMu Ya Rabb.

Shalawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW, Manusia Suci yang menjadi manifestasi makhluk Ilahi yang sempurna dan pemimpin alam semesta. Manusia Suci yang telah membawa kita sekalian dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan naungan Ilahi dan kesucian ilmu pengetahuan. Manusia suci yang kerinduan manusia selalu tertuju padanya dan keluarganya yang suci.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya selama penulisan skripsi ini dibuat, terutama kepada:

1. Kedua Orang tua penulis, H. Ambo Ake dan Hj. Erni. Terimakasih untuk semua cinta, doa, motivasi, dan semangat yang tak terbatas. Terimakasih telah mengajarkan penulis tentang kesabaran, tentang hidup yang harus terus berjalan, tentang ikhlas yang tanpa batas

Terimakasih untuk semua hal yang kalian beri meski tak mengharapkan apapun.

2. Saudara Penulis, Maryam dan Erwin Fajriansyah. Terimakasih telah menjadi adik-adik terbaik.
3. Bapak Rektor Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Bapak Wakil Rektor I, Prof. Dr. Dadang Ahmad Suriamiharja, Bapak Wakil Rektor II, dr. Wardihan Sinrang, Bapak Wakil Rektor III Dr. Nasaruddin Salam, dan Ibu Wakil Rektor IV, Prof. Dwia Aries Tina.
4. Bapak Dekan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas
5. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Pembimbing I dan Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini. Serta kepada Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. Muchsin Salnia, S.H. dan Kasman Abdullah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran sebagai wujud penyempurnaan skripsi ini.
6. Narasumber, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Nasional, Pak Yosep Adi Prasetyo, serta seluruh jajaran Dewan Pers. Ketua Aji (Aliansi Jurnalistik Independen) Kota Makassar, Terima kasih untuk waktu dan partisipasinya dalam penelitian penulis.

7. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya dosen di bagian Hukum Tata Negara. Terima kasih atas segala pengetahuan tentang hukum yang diberikan kepada penulis.
8. Para staf perpustakaan Hukum Unhas. Terima kasih atas waktu dan pelayanan yang baik selama penulis berada di Fakultas Hukum dalam hal pencarian pengetahuan di buku-buku yang tersedia.
9. Kak Arqam Azikin, dan Bapak Selamat Lumbang Gaol, terimakasih untuk semua waktu dan masukan-masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kak Armansyah Rahim, S.T., yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk belajar mengenal dunia. Terimakasih telah memberikan kesempatan belajar di Penerbitan Kampus Identitas.
11. Kak Andi Ryza Fardiansyah S.H, yang hingga saat ini terus memberikan pelajaran kepada penulis. Terimakasih telah menjadi teladan yang baik, terimakasih telah memperkenalkan penulis dengan HMI Kom. Hukum Unhas.
12. Sahabat terbaik penulis, Ghina MHP SH, Nurhasa SH, Andi Sulastri Supardi S.H, Yupitasari SH, Mursyidah Nurfadila, ST. Masyitah. Sri Diana Pertiwi, Terimakasih telah membagi cerita dan cinta tentang persaudaraan.
13. Teman belajar Penulis di Penerbitan Kampus Identitas, Abdul Rahman, Khairil Anwar, Muh. Iswandi, Mustafa, Syamsiah Terimakasih telah setia menemani penulis belajar berorganisasi,

belajar menulis dan belajar mengenal dunia. Terimakasih karena menjadi saudara terbaik penulis.

14. Pengurus PK Identitas Periode 2011-2012, Kak Hadrianti HD Lasari Skm, Kak Icha Icha Dian Skm, Kak Kun Agung Sumarmo SE, Kak Firmansyah, Kak Hardianti Spt, Kak Muhammad Syukri Skm
Terimakasih telah memberi ruang belajar dan berdiskusi di PK Identitas.

15. Keluarga Kecil Penerbitan Kampus Identitas, Kak Hasyim Partang ST, Kak Gunawan Mashar, Kak Reza Rahardian, Kak Ikbai Jafar, Kak Idham Malik, Kak Hidayat Doe, Kak Sinbad Oktanza, Kak Aniswati Syahrir, Kak Sheila Mayasari, Kak Satriani, Kak Mifda Hilmiyah S.Kom, Kak Fadli Mustamin Sp, Kak Heri Pasaribu Sp, Kak Ummul Masir Spt, Kak Atrasina Adlina, Kak Hasdinar, Waode Asnini Rasdiana Sinala, Esa Ramadhana, Imam Hidayat, Sita Nurasmi, Nuralfianita, Ermi Aulia, Ahmad Dhani, Novianto, Cita, Rizki Wulandari, Siti Athirah, terimakasih telah memberi ruang belajar bagi penulis dan menjadi saudara yang selalu menemani penulis.

16. Pak Dani Kristianto dan kak Irmawati, serta rekan-rekan kerja penulis di Tempo, terimakasih telah mengajarkan banyak hal kepada penulis, terimakasih untuk semua pengertian dan kesabarannya, memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas akhir ini.

17. Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Unhas, Kak Al-Kadri Nur SH, Kak Muhammad Irwan SH MH, Kak Sayid Muh.Faldy SH, Kak Rizal Rustam SH, Kak Asrina Darwis SH, Kak Wiryawan Batara Kencana SH, Kak Fadila SH MH Kak Andi Akmal Firdaus, Kak Yuda Sudawan SH, Kak Ali Rahman SH, Kak Abdillah Zikri SH, Kak Suriadi, Kak Mariani SH, Kak Khairunnisa SH, Kak Andi Dewi SH, Kak Andi Sahapadliah SH, Kak Khalid Hamka SH, Muhammad Natsir Bahktiar SH, Kak Vidya Meisyal, Kak Irtanto SH, Kak Arfan Ardin SH, Kak Dito, Andi Sulastri Supardi SH, Ghina MHP SH, Hartono, Dio Diantara, Akbar Pananrang, Zainul Alim dan adik-adik tercinta yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih telah menjadi keluarga penulis di Fakultas Hukum Unhas.

18. Teman-teman KKN Unhas Gel. 82 Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, Magis Perdana Indrata Putra, Nurfika Ramdani, Febrianto, Kamaruddin, Taufik Al Islam, Aswar, Haris terimakasih atas Persaudaraan yang kalian tanamkan, tawa, hingga tangis yang takkan terlupakan.

19. Teman-teman Doktrin 09 dan teman-teman JPPB. Terima kasih untuk perkenalan dan pertemanan yang terjalin selama ini.

20. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Unhas, Ibu Dra. Sri Wahyuni, pak Bunga, kak Tia, kak Tri, Ibu Haji, pak Ramelan,

dan semuanya. Terima kasih atas segala bantuan dan arahnya selama penulis mengurus administrasi di Fakultas Hukum Unhas.

21. Para *Cleaning Service* dan Satpam Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih, karena atas jasa-jasanya semua kegiatan perkuliahan dapat berjalan lancar.

Terimakasih untuk semua pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu persatu. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepanya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak umum yang berminat terhadap karya ini.

Makassar, 3 Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	6
1. Tujuan Penulisan	6
2. Kegunaan Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
A. Tinjauan Teoritis Mengenai Pers	8
1. Pengertian Pers	8
2. Asas, Fungsi dan Peranan Pers di Indonesia.....	11

3. Teori dan Sistem Pers di Indonesia.....	19
4. Pers di Negara Eropa dan Amerika	31
B. Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers ..	36
1. Sejarah Dewan pers.....	36
2. Sengketa Pers	39
3. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	40
4. Pers Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia	43
5. Regulasi Tentang Pers	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	55
C. Teknik Pengumpulan Data	56
<u>D. Jenis dan Sumber Data</u>	<u>56</u>
E. Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Kedudukan Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa	58
1. Dewan Pers	65

2. Data Pengaduan ke Dewan Pers.....	69
B. Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan	
Media Massa	84
1. Dasar hukum pembentukan Dewan Pers	84
2. Fungsi Dewan Pers dalam Penyelesaian Sengketa.....	85
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

LAMPIRAN GAMBAR

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi merupakan manifestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi, di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 E dan Pasal 28 huruf F Perubahan II Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sebagai satu negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia tentunya dibebani kewajiban internasional untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangannya agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.¹

Pada era reformasi dan demokrasi, adanya suatu kebebasan pers merupakan sebuah keharusan. Meskipun pada sisi lain menimbulkan persoalan kontroversial. Memang kebebasan pers dijamin secara

¹ A. Mignolo. 2009. *Undang-Undang Pers*. Dikutip pada laman website: <http://catatancalonwartawan.wordpress.com/tag/undang-undang-pers/> (diakses pada hari Rabu, 23 Oktober 2013 pkl 06.45 Wita)

nasional. Namun, kebebasan apapun tidak diharapkan adanya kebebasan pers yang total absolut.²

Undang-undang yang baru diubah setelah jatuhnya era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mengindikasikan perubahan sesuai dengan cita-cita reformasi yang mendambakan kehidupan berdemokrasi. Hal ini dapat dilihat pada bagian pertimbangan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 yang menekankan: bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 harus dijamin. Nilai-nilai demokrasi menjadi landasan lahirnya UU tentang pers ini.

Namun, UU Pers yang menjamin kemerdekaan berekspresi dan berpendapat ternyata belum sepenuhnya dapat menjamin pers dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini. Padahal dalam UU tersebut, pers dijamin dan mendapat perlindungan hukum, serta dibebaskan dari paksaan dan campur tangan pihak manapun. Hal ini dapat terlihat dari berbagai peristiwa yang menimpa dunia pers sejak jaminan dan peraturan tentang pers diundangkan. Hal yang harus menjadi perhatian adalah tentang jati diri pers itu sendiri. Dikatakan bahwa pers merupakan alat

² Indriyanto Seno Adji. *Hukum dan Kebebasan Pers*. (Jakarta: Diadit Media, 2008), hlm. 10

kontrol kekuasaan yang kemudian dirumuskan menjadi kontrol sosial (*social control*) yang artinya bahwa masyarakat yang dikontrol. Hal inilah yang terjadi di Indonesia, pers bukan menjadi kontrol oleh masyarakat atas kekuasaan tapi kekuasaan yang mengontrol masyarakat.³

Kebebasan pers masih belum dapat terwujud. Ketika ia melakukan fungsinya sebagai wahana informasi dan alat kontrol sosial, pers masih dapat dijerat dengan pasal-pasal Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Padahal pers telah memiliki undang-undangnya sendiri, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999. Namun, dalam praktiknya digunakan UU lain, seperti KUHP, untuk mengatur kegiatan jurnalistik yang dilakukan pers. Hal ini dapat mengarah pada kriminalisasi pers sebagai bentuk lain dari pembungkaman terhadap dunia pers.

Hadirnya dewan Pers sejak tahun 1966 melalui UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, yang pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi HAM, karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik hal itu

³ Ariel Herianto. *Pers Hukum dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 5.

dipertegas pada salah satu fungsi dewan pers yang tertuang pada UU Nomor 40 tahun 1999 pada pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan:

“Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.

Dari fungsi yang dirumuskan di atas, secara empiris Dewan Pers telah menjadi mediator dalam sengketa antara pers sebagai pemberita, dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dewan Pers sejak tahun 2003-2008 terdapat 1.332 pengaduan. Baik pengaduan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk data sementara pada tahun 2008 berdasarkan laporan komisi pengaduan masyarakat dan penegakan etika pers dewan pers sedikitnya menerima 424 pengaduan. Selama tahun 2008 dari sejumlah kasus yang ada, Dewan Pers berhasil menyelesaikan secara mufakat 13 pengaduan melalui mediasi.

Salah satu kasus yang terjadi di Makassar Sulawesi Selatan adalah penangkapan Upi Asmaradhana selaku Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers, oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Sulawesi dan Barat, Irjen Sisno Adiwiryo dengan alasan penghinaan dan fitnah, sebagaimana diatur Pasal 317 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam kasus ini menurut kapolda pada saat itu sengketa pers bisa langsung dipidanakan tanpa

terlebih dulu menggunakan mekanisme hak jawab.⁴ contoh kasus yang dituliskan di atas merupakan kasus yang berkaitan dengan delik pers, yaitu perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana yang berhubungan dengan bidang pers. Fenomena tersebut kemudian dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana posisi dan fungsi UU Pers dalam kasus seperti ini. UU Pers sudah ada, namun dalam penerapannya masih digunakan KUHP yang mengatur pers dalam melakukan tugasnya. Meski UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menyediakan pranata penyelesaian sengketa pers, namun pada umumnya aparat penegak hukum masih mengandalkan KUHP dan juga KUH Perdata dalam menyelesaikan sengketa antara pers dengan individu atau kelompok masyarakat. Meski di sisi lain, harus diakui pula, kelemahan mendasar dari UU Pers sehingga menyebabkan aparat penegak hukum tidak bersedia untuk tunduk dibawah UU Pers.

Kelemahan UU Pers inilah yang harus diperbaiki agar dapat menjadi *lex specialis*⁵ bagi dunia pers di Indonesia. Hal ini juga masih menjadi polemik bahwa apakah UU Pers merupakan *lex specialis* atau bukan. Sistem peradilan di Indonesia nampaknya belum mampu mengakomodasi secara penuh penerapan dan pembatasan yang

⁴ Antara Sulsel. 2008. *Aji Makassar, Polda SulSel Sewenang-Wenang*. Dikutip pada laman website: <http://www.antarasulsel.com/print/381/aji-makassar-polda-sulsel-sewenang-wenang> (diakses pada hari Senin, 16 September 2013, pkl. 00.14 Wita)

⁵ *Lex specialis* (asas hukum yang bersifat khusus), *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

diperkenankan dalam hukum internasional terkait dengan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Dalam berbagai putusan pengadilan terkait dengan pencemaran nama baik, masih nampak bahwa persoalan ranah etika telah menjadi ranah hukum.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji secara objektif dan mengedepankan nilai-nilai intelektual serta berusaha melihat dengan perspektif yuridis, sehingga dalam penulisan skripsi ini jelas terlihat kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dewan pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers?
2. Sejauhmanakah fungsi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan pers?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mengetahui kedudukan dewan pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana fungsi dewan pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers.

2. Kegunaan Penulisan:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara kaitannya dengan Persoalan Pers. Di samping itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik penegakan hukum terutama sengketa-sengketa yang timbul akibat dari pemberitaan media massa di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis Mengenai Pers

1. Pengertian Pers

Istilah pers atau press berasal dari istilah latin *Pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. (*Ensiklopedi politik 4*). Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat cetak.⁶

Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.⁷ Dalam Ensiklopedi Nasional Inonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan,

⁶ Samsul Wahidin. *Hukum Pers*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35

⁷ Ibid.,

majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi.⁸

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁹

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata pers didefinisikan sebagai, usaha percetakan dan penerbitan; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; wartawan; penyiaran berita melalui Koran, majalah, televisi, radio, dsb.¹⁰

Sedangkan definisi pers menurut Beberapa ahli dapat dilihat sebagai berikut:¹¹

- **Rifhi Siddiq**, Pers adalah sebuah alat komunikasi massal yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang terjadi dan merupakan sebuah lembaga yang berpengaruh dan menjadi bagian integral dari masyarakat.

⁸ Ibid., hlm. 36

⁹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹⁰ Pius Abdillah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Arkola, 2010), hal. 498

¹¹ Wikipedia. 2013. *Media Massa*. Dikutip pada laman *website*: [http://id.m.wikipedia.org/wiki/media massa](http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_massa) (diakses pada hari Kamis, 12 September 2013 pkl. 21.13 Wita)

- **R Eep Saefulloh Fatah**, Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.
- **Oemar Seno Adji**, membedakan pers kedalam dua bagian, Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis, dan Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.
- **Kustadi Suhandang**, Pers adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.
- **Wilbur Schramm**, Dalam bukunya Four Theories of the Press yang ditulis oleh Wilbur Schramm dkk mengemukakan 4 teori terbesar pers, yaitu the authoritarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah tengah masyarakat.

- **McLuhan**, Pers sebagai the extended man (media adalah ekstensi manusia), yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada moment yang bersamaan.
- **Raden Mas Djokomono**, Pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak hak Bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda.

2. Asas, Fungsi dan Peranan Pers di Indonesia

1) Asas Pers

a. *UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.¹²

- **Asas Demokrasi**, Pers harus memegang prinsip demokrasi, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.

¹² Edi Susanto. *Hukum Pers di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 38

- **Asas Keadilan,** Dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah).
- **Asas Supremasi Hukum,** Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan Hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa:

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari ketentuan pasal ini antara lain:¹³

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

b. Kode Etik Jurnalistik PWI

Kode Etik Jurnalistik perkumpulan wartawan Indonesia berasaskan pada prinsip-prinsip Profesionalitas, nasionalisme, demokrasi, dan religius.

- 1) **Asas Profesionalitas**, Asas yang tidak memutarbalikkan fakta, tidak memfitnah; Berimbang, adil dan jujur; Mengetahui perbedaan kehidupan pribadi dan kepentingan umum; Mengetahui kredibilitas nara sumber; Sopan dan terhormat dalam mencari berita; Tidak melakukan plagiat; Meneliti semua kebenaran bahan berita terlebih

¹³ Ilham Hadi. 2013. *Pemberitaan Pers*. Dikutip pada laman website: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5152469d75905/pemberitaan-pers-dan-asas-praduga-tak-bersalah> (Diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2013. Pkl. 22.03 Wita)

dahul; Tanggung jawab moral besar (mencabut sendiri berita yang salah walaupun tanpa ada permintaan).

- 2) **Asas Nasionalisme**, Merupakan Asas Prioritas kepentingan umum, mendahulukan kepentingan nasional; Pers bebas mengkritik pemerintah sepanjang hal itu untuk kepentingan nasional; Mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan Negara; Memperhatikan keselamatan keamanan bangsa; Memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) **Asas Demokrasi**, Pers dapat berisi promosi tetapi pers tidak boleh menjadi alat propaganda; Harus *cover both side*; Harus jujur dan berimbang.
- 4) **Asas Religius**, Alam pemberitaannya tidak boleh melecehkan agama; Menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lain; Beriman dan bertakwa.

c. Asas Yang Berlaku Universal

Adapun asas-asas yang berlaku secara universal yaitu Asas “Pars Prototo”, Asas “Trial by Press”, Asas “Cover both sides”.

- **Asas “Pars Prototo”**, Dalam hal ini dengan melihat sistem pemerintahan oleh Penguasa dalam suatu negara, maka kita bisa tahu sistem Pers yang berlaku di negara tersebut.
- **Asas “Trial by Press”**, Dalam hal ini Pers tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili seseorang yang dianggap telah melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, karena pada

hakekatnya itu adalah kewenangan dari aparat penegak hukum. Sehingga Pers tidak diperbolehkan mengintervensi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara/sengketa.

- **Asas “Cover both sides”**, Pers dalam penyampaian informasi (pemberitaan) kepada masyarakat tidak boleh memihak salah satu pihak, dalam artian berita harus berimbang dan adil. Hal ini juga mengacu pada ketentuan pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

2) Fungsi Pers

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan atau edukasi, hiburan atau rekreasi, kontrol sosial atau koreksi dan juga sebagai mediasi.¹⁴

1. Pers sebagai Media Informasi, Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang paling utama. Khalayak ramai mau berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Selain itu pers bertujuan melakukan penerangan, artinya memberi informasi yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang

¹⁴ Yogha Praditya. 2013. *Fungsi Pers*. Dikutip pada laman website: <http://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers/> (diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2013. Pkl. 23.45 Wita)

masalah pembangunan. Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme.

2. Pers sebagai Media Edukasi, Salah satu fungsi pers yang tertuang pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 sebagai media pendidikan. Dalam menjalankan fungsi ini tentu pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Salah satu peranan pers sebagai media pendidikan, pers harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat, terutama pelajar.
3. Pers sebagai Media Kontrol Sosial, Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Menurut Undang-Undang Pers Nomer 40 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana kominukasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.
4. Pers sebagai Media Hiburan, Dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang

melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau peraturan tidak diperbolehkan.

5. Pers sebagai Mediasi atau penghubung, Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. Komunikasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur resmi atau kelembagaan dapat dialihkan via pers. Media massa memiliki peran mediasi antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi. Artinya media massa seringkali berada di antara kita dengan bagian pengalaman yang lain di luar persepsi dan kontak langsung kita.

Hikma Kusumaningrat dan Purnama Kusuma Ningrat menyebutkan 8 fungsi pers yang bertanggungjawab sebagai berikut:¹⁵

1. Fungsi Informatif: memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.
2. Fungsi Kontrol Pers yang Bertanggungjawab: Pada fungsi ini, pers diibaratkan masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah/ perusahaan.
3. Fungsi Interpretatif dan Direktif: Memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat akan arti suatu kejadian.
4. Fungsi Menghibur: Para wartawan menceritakan kisah-kisah dunia yang hidup dan menarik.

¹⁵ Hikma Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 27-29.

5. Fungsi regeneratif: Membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan tua sampai angkatan yang lebih muda.
6. Fungsi Pengawasan Hak-Hak Warga Negara: pers yang bekerja berdasarkan teori tanggung jawab harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan akan hal yang dibutuhkannya.
7. Fungsi Ekonomi: Melayani sistem ekonomi melalui iklan.
8. Fungsi swadaya: Pers berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri, untuk memelihara kebebasan yang murni.

3) Peranan Pers

Dalam era demokrasi sekarang ini, pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan, atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah menjadi lebih terbuka. Keterbukaan ini menjadi pertanda berlakunya suatu pemerintahan yang demokratis, sebab masyarakat pun menyampaikan pesan dan masukannya secara terbuka. Keterbukaan dapat berarti kontrol sesuai pasal 6 UU No. 40/1999, pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan. Selain itu informasi yang disampaikan harus jelas dan obyektif mengenai apa, siapa dan dimana informasi itu disampaikan, dalam hal ini informasi yang menarik dan yang mempunyai nilai berita tinggi yang biasanya banyak jadi konsumsi masyarakat.

3. Teori dan Sistem Pers di Indonesia.

Sistem pers adalah subsistem dari sistem komunikasi. Ia mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sistem lain. Unsur yang paling penting dalam pers adalah media massa. Media massa menjalankan fungsi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Melalui media, masyarakat dapat menyetujui atau menolak kebijakan

pemerintah. Lewat media pula berbagai inovasi atau pembaruan bisa dilaksanakan oleh masyarakat.¹⁶

Inilah peran pentingnya pers. Marshall Mc Luhan menyebutnya sebagai *The Extension Of Man* (Media adalah ekstensi manusia).¹⁷ Dengan kata lain media adalah perpanjangan dan perluasan dari kemampuan jasmani dan rohani manusia. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap, perasaan manusia bisa disebarluaskan oleh pers. Kunci untuk memahami sistem pers yang ada di suatu tempat terletak pada pemahaman tentang sistem masyarakat di tempat pers itu beroperasi. Di lain pihak, sistem pers yang dianut sebuah negara bisa juga ditentukan oleh teori media yang diadopsi oleh negara bersangkutan.

Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm (1956) membagi sistem komunikasi pada empat model pers, yaitu Pers Otoritarian, Pers Libertarian, Pers Soviet Komunis atau Pers Totalitarian, dan Pers Tanggungjawab Sosial.¹⁸

a) *Authoritarian Press (Pers otoriter),*

Perkembangan otorisme pada pertengahan abad ke-15 juga menyebabkan timbul satu konsep otoriter pada kehidupan pers di dunia. Dengan prinsip dasar otorisme yang cukup sederhana, bahwa pers hadir untuk mendukung negara dan pemerintah. Pers

¹⁶ Mariesa Giswandhani, 2013. *Sistem pers di Indonesia*. Dikutip pada laman website: <http://mgiswandhani.blogspot.com/2013/03/sistem-pers-indonesia.html> (diakses pada hari Kamis, 3 Oktober 2013 pk. 13.45 Wita)

¹⁷ Edy Susanto. Loc. cit. hlm. 20.

¹⁸ Vita Kent. 2010. *Perkembangan Sistem Pers di Indonesia*. Dikutip pada laman website: <http://vitakent.blogspot.com/2010/04/perkembangan-sistem-pers-di-indonesia.html> (diakses pada hari Kamis, 10 Oktober 2013 pk 13.05 Wita)

bertungsi secara vertikal dari atas ke bawah dan penguasa berhak menentukan apa yang akan diterbitkan atau disebarluaskan dengan monopoli kebenaran di pihak penguasa.

Istilah otoriter mengacu pada tingkat pengaturan pers yang sangat besar. Pers diharapkan netral, namun ditujukan dalam hubungannya dengan pemerintah atau kelas penguasa dengan pengaturan yang disengaja atau tidak disengaja pers digunakan sebagai alat kekuasaan negara untuk menekan.

b) Libertarian Press (Pers Liberal)

Teori liberal berkembang di Inggris dan Amerika Serikat setelah tahun 1688. Teori pers liberal merupakan penerapan filsafat umum rasionalisme dan hak-hak ilmiah dalam bidang pers. Tugas pers yang terpenting disini memberikan informasi, menghibur, menjual, membantu menemukan yang terbaik, dan melaksanakan kontrol sosial serta pemerintahan. Pemanfaatan pers secara terbuka, maksudnya siapapun berhak untuk menggunakannya.

Pemberitaan yang dilarang berupa pemberitaan yang bersifat fitnah, cabul, tidak senonoh, dan penghianatan saat perang. Perusahaan pers biasanya dimiliki oleh kalangan privat (swasta). Mekanisme aktivitas pers difokuskan pada tindakan memeriksa/mengontrol pemerintah dan mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Libertarian theory akan berkembang menjadi *responsibility theory*. Dalam teori liberal, pers bukan alat pemerintah melainkan sebagai alat untuk menyajikan fakta, alasan, dan pendapat rakyat untuk mengawasi pemerintah (social control terhadap pemerintah) sebagai berikut:

1. Memberi penerangan kepada masyarakat.
2. Melayani kebutuhan pendidikan politik masyarakat.
3. Melayani kebutuhan bisnis.
4. Mencari keuntungan.
5. Melindungi hak warga masyarakat.
6. Memberi hiburan kepada masyarakat.

c) *Soviet Communist Press (Pers Komunis Soviet)*

Sistem pers Komunis Soviet menganut beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Media Massa harus melayani kepentingan dan, dan berada dalam kontrol kelas pekerja.
2. Kalangan swasta tidak dibenarkan memiliki media.
3. Media harus selalu melakukan tugas fungsi positif bagi masyarakat dengan cara melakukan upaya sosialisasi norma-norma yang diinginkan, pendidikan, penerangan, motivasi dan mobilisasi.

4. Dalam menjalankan seluruh tugasnya kepada masyarakat, media harus tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan khalayaknya.
5. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya dalam upaya mencegah atau memberikan hukuman setelah terjadinya peristiwa publikasi yang bersifat anti-sosial.
6. Media harus memberikan pemikiran dan pandangan yang lengkap dan objektif mengenai masyarakat dan dunia yang sesuai dengan ajaran Marxisme-Leninisme.
7. Wartawan adalah kalangan profesional yang bertanggung jawab yang memiliki tujuan dan cita-cita yang selaras dengan kepentingan utama masyarakat.
8. Media harus mendukung gerakan-gerakan progresif di dalam dan di luar negeri

D) Social Responsibility Press (Pers Tanggung Jawab Sosial)

Pers selalu mengambil bentuk dari struktur sosial dan politik dimana pers itu beroperasi. Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa, kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsinya.

Pada hakikatnya fungsi pers dalam teori tanggung jawab sosial ini tidak berbeda jauh dengan yang terdapat pada teori libertarian namun pada teori yang disebut pertama terefleksi semacam ketidakpuasan terhadap interpretasi fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaannya oleh pemilik dan pelaku pers dalam model libertarian yang ada selama ini.

Dalam konsep tanggung jawab sosial media dituntut sebagai berikut:

- Menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat, dimana kewajiban itu dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan.
- Media juga harusnya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.

Sistem pers di Indonesia tidak terlepas dari hubungannya dengan pemerintah, masyarakat dan negara, dimana Pers juga merupakan alat untuk mencapai cita-cita bangsa yakni:¹⁹

- Mewujudkan suatu kehidupan yang demokratis berdasarkan Pancasila.
- Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur materiil, spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹ Anwar Mahendra. Memorial A Moein, *Standar Kompetensi Wartawan Suatu Keniscayaan*. (Makassar: Makassar press, 2007), hlm. 61

- Mewujudkan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia, terutama dengan negara-negara ASEAN, atas dasar hormat menghormati satu sama lain, atas dasar kerjasama membentuk suatu dunia yang bersih dari penindaan dan penjajahan menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

Jika kita merujuk pada tujuan negara yakni masyarakat pancasila yang adil yang adil dan makmur. Adil dalam pengertian dapat memenuhi kepuasan mental bangsa kita, dan makmur dalam pengertian dapat memenuhi kebutuhan materil bangsa kita. Dengan demikian tanggungjawab yang dipikul oleh pers hampir sama dengan tanggungjawab pemerintah, karenanya antara pers dengan pemerintah sudah sepatutnya saling membantu.²⁰

Sebagaimana yang dimaklumi, GBHN mengisyaratkan bahwa antara pemerintah, pers dan masyarakat, terjalin interaksi positif, yakni interaksi antara pemerintah, pers dan rakyat. Artinya, pers adalah *partner* pemerintah dalam menyejahterakan rakyat dan menyukseskan program pembangunan yang ada. Begitu pula pemerintah menyalurkan pesan-pesannya kepada rakyat. Sedangkan rakyat menyalurkann aspirasinya lewat pers tersebut. Sebagai jembatan menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Pers tanpa melakukan sosial kontrol maka pers tersebut tak ada

²⁰ Ibid.,

gunanya. Tapi hendaknya sosial kontrol tersebut disertai solusi atau saran perbaikan.²¹

Menanggapi empat teori pers, "*Four Theories of the Press*" yang ditulis oleh Fred S Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm di atas. Ahli komunikasi massa Denis McQuail menambahkan 2 teori pers yaitu, teori pers pembangunan dan teori pers demokratis-partisipan. Sementara Anwar Arifin dari Universitas Hasanuddin Merumuskan satu sistem lagi, yaitu "*Pancasila Press Theory*".²²

Dalam melihat sistem pers atau sistem media sebagaimana yang telah diuraikan, sesungguhnya pers tidak dapat diangkat dan tidak dapat ditinjau lepas dari struktur masyarakatnya. Oleh karena itu struktur sosial politik bersifat menentukan bagi corak, sepaik terjang serta tujuan yang hendak dicapai oleh Pers. Karena struktur sosial politik dilandasi masyarakat, pers pun berlandaskan atas sosial politik yang berkembang di masyarakat dan mencerminkan falsafah masyarakat. Bahwa pers melayani kepentingan politik dan tunduk pada system politik. Ketika sistem politik otoriter berlaku, maka sistem pers juga otoriter dan ketika arus politik menggulung sistem otoriter maka sistem otoriter juga tergeser.²³

Negara sebagai sebuah kesatuan wilayah, sebuah kesatuan politik yang memiliki otonomi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara warga negaranya dapat dikatakan sebagai

²¹ Ibid., hlm. 63

²² Hari Wiriawan. *Dasar-Dasar Hukum Media*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 71

²³ Ibid.,

sebuah sistem makro yang mencakup beragam sistem-sistem lain didalamnya. Sudah menjadi kewajiban mutlak bagi sebuah negara untuk mampu melindungi, mengatur, dan menjaga kelangsungan sistem-sistem lainnya yang berada dibawah ruang lingkupnya.

Pers sebagai sebuah media untuk menyalurkan, untuk mewujudkan kebebasan itu sudah pasti tentunya harus mendapatkan porsi jaminan yang besar. Dalam mewujudkannya setiap negara pastilah memiliki latar belakang dan cita-cita yang berbeda, ini pulalah yang setidaknya berdampak pada diferensiasi pedoman dan aktualisasi peran negara dalam menjamin terus berjalannya sistem pers yang dipergunakan.

Keempat teori yang digagas di atas lahir dan dibesarkan dalam masyarakat Eropa/ Amerika. Sumber gagasan teori media pembangunan adalah laporan Komisi Internasional UNESCO tentang studi masalah komunikasi.²⁴ Teori media pembangunan mengajarkan bahwa media massa seharusnya ikut memikirkan tujuan pembangunan bangsa. Media juga seharusnya sejalan dengan pembangunan nasional. Kebebasan media juga disesuaikan dengan tujuan utama pembangunan bangsa. Media nasional harus memberi prioritas bagi kebudayaan dan bahasa nasional.²⁵

Sedangkan *Teori Media Demokratis-Partisipan* menggabungkan beberapa unsur dalam teori pers liberal dan unsur teori pers pembangunan. Khususnya penekanan pada masyarakat, pada

²⁴ Ibid., hlm. 74

²⁵ Ibid., hlm. 75

komunikasi horizontal, bukan komunikasi vertikal. Perumusan teori ini didorong oleh reaksi atas komersialisasi dan pemonopolian media yang dimiliki secara pribadi dan terhadap sentralisme dan birokratisasi lembaga siaran publik. Inti teori ini menganjurkan untuk memenuhi hak atas informasi dari masyarakat, hak untuk menjawab kembali, dan hak untuk menggunakan sarana komunikasi untuk berinteraksi dengan kelompok berskala kecil dan kelompok kepentingan sub-budaya.²⁶

Intisari mengenai pers pancasila itu, adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- b) Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri.
- c) Hakikat Pers Pancasila adalah Pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol sosial konstruktif. Melalui hakikat dan fungsi pers pancasila mengembangkan suasana saling percaya

²⁶ Ibid.,

²⁷ Sisi. 2008. *Sistem Komunikasi di Indonesia*. Dikutip pada laman website: <http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2008/05/sistem-komunikasi-indonesia.html> (Diakses pada hari Kamis, 10 Oktober 2013 pk. 15.07 Wita)

menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggungjawab.

Ibarat sebuah bangunan, pers hanya akan bisa berdiri kokoh apabila bertumpu pada tiga pilar penyangga utama yang satu sama lain berfungsi saling menopang. Ketiga pilar itu adalah:²⁸

a. Idealisme.

Dalam pasal 6 UU Pers no 40 tahun 1999 dinyatakan, pers nasional melaksanakan peranan sebagai: a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan hak-hak azasi manusia serta menghormati kebhinekaan; c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Maknanya, bahwa pers harus memiliki dan mengemban idealisme. Idealisme adalah cita-cita, obsesi, sesuatu yang terus dikejar untuk dijangkau dengan segala daya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi yang berlaku serta diakui oleh masyarakat dan negara. Menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, adalah contoh idealisme yang harus diperjuangkan

²⁸ Adi Prakosa. 2008. *Sistem Pers di Indonesia*. Dikutip pada laman website: www.Google.com/adiprakosa.blogspot.com/2008/01/sistem-pers-indonesia.html (Diakses pada hari Kamis, 3 Oktober 2013 pkl. 14.25 Wita)

pers. Dasarnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) UU no 40 tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

b. Komersialisme.

Pers harus mempunyai kekuatan dan keseimbangan. Kekuatan untuk mencapai cita-cita itu, dan keseimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai profesi yang diyakininya. Agar mendapat kekuatan, maka pers harus berorientasi kepada kepentingan komersial. Seperti ditegaskan pasal 3 ayat (2) UU no 40 tahun 1999, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, penerbitan pers harus dijalankan dengan merujuk pada pendekatan kaidah ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Secara manajerial perusahaan, pers harus memetik untung dan sejauh mungkin menghindari kerugian. Dalam kerangka ini, apapun sajian pers tak bisa dilepaskan dari muatan nilai bisnis komersial sesuai dengan pertimbangan dan tuntutan pasar. Hanya dengan berpijak pada nilai-nilai komersial, penerbitan pers bisa mencapai cita-citanya yang ideal.

c. Profesionalisme

Profesionalisme adalah isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan. Seseorang bisa disebut profesional apabila dia memenuhi lima ciri

berikut: a. memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempatan pengalaman, pelatihan, atau pendidikan khusus di bidangnya; b. mendapat gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai dengan keahlian, tingkat pendidikan, atau pengalaman yang diperolehnya; c. seluruh sikap, perilaku dan aktivitas pekerjaannya dipagari dengan dan dipengaruhi oleh keterikatan dirinya secara moral dan etika terhadap kode etik profesi; d. secara sukarela bersedia untuk bergabung dalam salah satu organisasi profesi yang sesuai dengan keahliannya; e. memiliki kecintaan dan dedikasi luar biasa terhadap bidang pekerjaan profesi yang dipilih dan ditekuninya; f. tidak semua orang mampu melaksanakan pekerjaan profesi tersebut karena untuk menyelaminya mensyaratkan penguasaan ketrampilan atau keahlian tertentu. Dengan merujuk kepada enam syarat di atas, maka jelas pers termasuk bidang pekerjaan yang mensyaratkan kemampuan profesionalisme.

4. Pers di Negara Eropa dan Amerika

Negara-negara maju meyakini dan telah membuktikan bahwa kebijakan informasi yang terbuka akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Dengan adanya kebijakan informasi yang terbuka, masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan sebuah kebijakan pemerintah. Negara yang dapat disebut sebagai yang pertama sekali menerapkan

undang-undang yang mengatur kebebasan memperoleh informasi adalah Swedia. Sejak tahun 1776, Swedia menetapkan UU Kebebasan Press (Freedom of The Press Act). Undang-undang ini di negara tersebut disebut sebagai bagian dari empat hukum dasar Swedia. Tiga undang-undang lainnya adalah UU Instrumen Pemerintahan, UU Pergantian Raja, dan UU Kebebasan Berekspresi (Haryanto, 2005).²⁹

Di Swedia, secara garis besar jaminan akses publik terhadap dokumen resmi ini mencakup hal-hal:³⁰

1. hak publik untuk membaca dan mendapatkan dokumen resmi.
2. hak aparatur penyelenggara negara, termasuk aparatur pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang apa yang ia ketahui kepada siapapun.
3. hak aparatur penyelenggaran neraga untuk menyampaikan informasi/dokumen kepada media massa.
4. hak publik dan media massa untuki hadir pada pertemuan-pertemuan resmi parlemen, Municipal Assemby dan Country Council.

Inggeris, sebuah negara maju yang dikenal memiliki tradisi demokrasi yang cukup panjang kiranya agak tertinggal dalam masalah keterbukaan informasi. UU yang pertama sekali ada adalah UU Rahasia

²⁹ Kurniawan. 2011. Pengetahuan tentag kebijakan informasi. Dikutip pada laman website: http://kurniawan-h--fisip08.web.unair.ac.id/artikel_detail-37121-kebijakan%20informasi-pengetahuan%20tentang%20kebijakan.html (diakses pada hari Rabu, 30 Oktober 2013 pkl 02.28 Wita)

³⁰ Ibid.,

Negara yang menutup akses publik untuk mengetahui jalannya pemerintahan dan ditujukan untuk mencegah tindakan spionase yang terjadi beberapa kali di negara ini. Pada tahun 1984, Inggris mengesahkan UU Perlindungan Data yang menjamin hak seseorang untuk melihat informasi pribadi yang disimpan pemerintah. Di tahun yang sama, disahkan juga UU Pemerintahan Daerah yang mengatur hak publik mengakses informasi. Baru pada tahun 1998, setelah munculnya laporan yang disebut sebagai Freedom of Information Proposal, yang ditandatangani oleh 240 anggota parlemen Inggris yang mengundang pemerintah membahas RUU Kebebasan Informasi. Setelah melewati proses panjang berliku, baru pada tahun 2000 UU Kebebasan Informasi disahkan di Inggris.³¹

UU Kebebasan Informasi di Amerika Serikat disebut Freedom of Information Act(FOIA). UU ini disahkan pertama sekali pada 4 Juli 1966 pada pemerintahan Lyndon B, Johnson dan terakhir diamandemen pada tahun 2002(Marybeth: 2006). Pada dasarnya UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak warga atau warga negara asing untuk mengakses dokumen ke instansi pemerintah. UU ini lahir karena perjuangan komunitas pers sejak tahun 1950an yang kerap mengangkat masalah hak untuk mengetahui berdasarkan pada klausul kebebasan pers pada Amandemen Pertama UUD Amerika Serikat. (Haryanto, 2005). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa

³¹ Ibid.,

setiap instansi pemerintah federal wajib memberikan informasi kepada masyarakat kecuali yang masuk dalam 9 kategori pengecualian. Instansi yang wajib memberikan informasi mencakup instansi pemerintah, instansi militer, perseroan milik pemerintah, perseroan yang dikendalikan pemerintah, cabang eksekutif lainnya termasuk didalamnya kantor kepresidenan.³²

Sembilan pengecualian yang tidak dapat dibuka untuk publik adalah:³³

1. Dokumen yang secara khusus ditetapkan sebagai dokumen rahasia oleh perintah eksekutif demi kepentingan keamanan nasional dan atau kebijakan luar negeri.
2. Dokumen yang berkaitan dengan aturan dan praktek personalia internal instansi
3. Dokumen yang secara khusus tidak boleh dibuka menurut undang-undang
4. Dokumen tentang rahasia dagang dan informasi komersial atau keuangan yang diperoleh dari perorangan dan bersifat khusus dan terbatas.
5. Memorandum atau surat-surat, informasi khusus penasehat hukum-klien, atau hasil karya penasihat hukum antar-instansi, atau intra-instansi
6. Arsip pribadi atau medis dan arsip serupa yang jika dibuka dapat menimbulkan pelanggaran privasi pribadi

³² Ibid.,

³³ Ibid.,

7. Dokumen atau informasi penyelidikan yang dihimpun untuk tujuan penegakan hukum yang jika dibuka dapat (a) mengganggu proses penegakan hukum, (b) menghilangkan hak seseorang di atas sidang yang wajar atau putusan pengadilan yang netral, (c) melanggar privasi pribadi, (d) membuka identitas sumber yang dirahasiakan, (d) membuka identitas sumber yang dirahasiakan, (e) membuka teknik penyelidikan, (f) mengancam nyawa atau keselamatan fisik seseorang.
8. Dokumen yang berisi atau berkaitan dengan laporan pemeriksaan, operasi atau kondisi tertentu lembaga-lembaga keuangan, atau
9. Informasi dan data geologi dan geofisika, termasuk peta sumur-sumur minyak atau gas.

Dari sekilas pengalaman di sejumlah negara, jelas bahwa jaminan penuh secara hukum atas hak atas kebebasan memperoleh informasi dalam bentuk undang-undang punya nilai penting. UU KMI merupakan perwujudan nilai-nilai demokrasi dimana pemerintah membuka diri secara transparan pada warga, sehingga publik dapat mengontrol proses pembuatan keputusan dan dapat berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. UU KMI juga dapat menjadi pegangan untuk menentukan hal-hal seperti pengecualian informasi dan penyelesaian sengketa informasi.

B. Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers

1. Sejarah Dewan pers

Secara yuridis Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968 berdasar UU No. 11 Tahun 1966 tentang pokok pers yang ditandatangani presiden Soekarno. Dewan Pers kala itu berfungsi mendampingi pemerintah membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional (pasal 6 ayat (1) UU No. 11/1966). Ketua dewan pers secara *ex-officio* dijabat menteri penerangan.³⁴

Keadaan seperti itu berlangsung selama Pemerintahan orde baru. Dimana menteri penerangan tetap merangkap Ketu Dewan Pers. Setelah UU No. 11 tahun 1966 diganti UU No. 21 tahun 1982 terjadi perubahan tetapi tidak mengubah kedudukan dan fungsi dewan pers, perubahan yang terjadi adalah dengan menyebut keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers, yaitu terdiri atas wakil organisasi pers, wakil pemerintah, dan wakil masyarakat (Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982). Sedangkan UU sebelumnya hanya menjelaskan “Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers”.³⁵

Perubahan fundamental terjadi tahun 1999. Melalui UU No. 40 tahun 1999 disahkan 23 September 1999 dan ditandatangani Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, dimana dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan: “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan

³⁴ Kusmadi. *Dewan Pers Periode 2010-2013*. (Jakarta: Dewan Pers, 2012), hlm. 9

³⁵ Ibid.,

kehidupan pers nasional, dibentuk dewan pers yang independen". Tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam pembentukan Dewan Pers indevenden. Anggotanya dipilih secara demokratis, terdiri atas: (a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perubahan pers (Pasal 15 ayat 3).³⁶

Anggota Dewan Pers independen yang pertama , periode 2000-2003, disahkan Presiden Abdul Rahman Wahid melalui Kepres No. 96/M tahun 2000. Terdiri atas 9 orang: Goenawan Mohamad, R.H. Siregar, dan Atang Ruswita dari unsur wartawan; Jacob Oetama, Surya Paloh, Zainal Abidin Suryokusumo, dan H. Azkarmin Zaini dari unsur perusahaan pers. Mewakili unsur masyarakat/pakar adalah Atmakusumah Astraatmadja dan Benjamin Mangkoedilaga (karena menjadi hakim Agung maka diganti oleh Bachtiar Aly). Melalui rapat dewan pers, 17 mei 2000, Atmakusumah terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2000-2003.³⁷

Keanggotaan Dewan Pers periode 2000-2003 ini berakhir pada bulan april 2003, bersama anggota badan pekerja dewan pers memilih anggota dewan pers periode 2003-2006. Melalui sidang pleno 14 April 2003 terpilih sembilan anggota yang disahkan melalui kepres No. 143/M Tahun 2003 yang ditandatangani Presiden Megawati Sukarnoputri 13

³⁶ Ibid.,

³⁷ Ibid., hlm. 10

Agustus 2003. Kesembilan anggota Dewan Pers tersebut adalah Ichlasul Amal, Sulastomo dan Hinca I.P. Panjaitan dari unsur masyarakat atau pakar. R.H. Siregar, Santoso, Uni Zulfiani Lubis dan Sutomo Prastho dari unsur wartawan. Untuk unsur pimpinan perusahaan media diwakili Amir Effendi Siregar dan Sabam Leo Batubara. Dimana Ichlasul Amal terpilih sebagai ketua Dewan Pers periode 2003-2006, dibantu R.H. Siregar sebagai wakil ketua. Kemudian pada periode 2006-2009 Ichlasul Amal terpilih kembali menjadi ketua dewan pers namun karena terlambatnya keputusan presiden untuk menetapkan anggota dewan pers menyebabkan perubahan periode keanggotaan menjadi 2007-2010. Hingga pada akhir 2009 dilakukan pemilihan anggota dewan pers periode 2010-2013. Dari proses tersebut terpilih Agus Sudibyo, Bagir Manan, dan Wina Armada Sukardi sebagai anggota dewan pers dari unsur masyarakat. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Muhammad Ridlo 'Eisy, dan zulfiani Lubis dari Unsur perusahaan pers. Bambang Hari Murti, Bakti Nugroho, dan Margiono mewakili unsur wartawan. Mereka ditempatkan melalui keputusan presiden RI Nomor 13/M tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010. Dan selanjutnya Bagir Manan dan Bambang Harymurti terpilih sebagai ketua dan wakil ketua.³⁸

³⁸ Ibid., hlm. 11

2. Sengketa Pers

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sengketa merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan perbedaan pendapat atau pertengkaran, sengketa sama dengan perselisihan, atau konflik. Konflik atau perselisihan dengan orang dekat sering mengakibatkan kerusakan hubungan penting dalam jangka waktu yang lama. Untuk konflik Pers adalah perselisihan yang terjadi antara orang perseorangan, masyarakat, atau lembaga pemerintahan dengan perusahaan-perusahaan pers. Konflik yang timbul akibat dari pemberitaan media massa.

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau le-bih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah situasi (keadaan) di mana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mere-ka masing-masing yang tidak dapat dipersatu-kan dan di mana tiap-tiap pihak mencoba meya-kinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing (Ronny Hanityo,1984:22).

Ada beberapa Unsur-unsur konflik yakni:

1. Adanya pihak-pihak (dua orang atau lebih).
2. Tujuan yang berbeda, yakni pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain berbuat atau bersikap sesuai dengan yang dikehendaki.
3. Pihak yang lain menolak keinginan tersebut atau keinginan itu tidak dapat dipersatukan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian melalui Litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus seperti peradilan anak, peradilan niaga, peradilan pajak, peradilan penyelesaian hubungan industrial dan lainnya.

Penyelesaian melalui Non Litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perseelisihan Hubungan Industrial, yang dilakukan dengan pihak perantara dengan cara musyawarah mufakat, melalui Negosiasi, Konsiliasi, dan Mediasi untuk win-win solution, dan melalui Arbitrase yang menentukan kalah dan menang.

3. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasihat Pemerintah

dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.³⁹

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:⁴⁰

- a) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b) Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d) Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e) Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

³⁹ Wikipedia. 2013. *Dewan Pers*. Dikutip pada laman website: http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers (diakses pada hari Rabu, 23 Oktober 2013. Pkl 12.05 Wita)

⁴⁰ Lihat, pasal 15 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

- f) Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g) Mendata perusahaan pers.

Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah didalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.

Salah satu fungsi yang menjadi dasar bagi Dewan Pers dalam menjalankan fungsi menyelesaikan sengketa, termasuk mediasi bersumber pada pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 yang menyatakan:

“Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.

Dari fungsi yang dirumuskan di atas, secara empiris Dewan Pers telah menjadi mediator dalam sengketa antara pers sebagai pemberita dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari fungsi tersebut, dalam struktur keorganisasian Dewan Pers dibentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Mediasi yang diperankan oleh dewan pers merupakan mediasi diluar proses pengadilan, dan bersifat sukarela atau

pilihan para pihak. Dengan demikian dewan pers dapat menjalankan fungsi mediasi jika yang memberitakan dan pihak yang merasa dirugikan akibat diberitakan meminta atau menyetujui Dewan Pers menjalankan fungsinya.⁴¹

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan fungsi menyelesaikan sengketa, dewan pers mengeluarkan peraturan dewan pers No. 1/ Peraturan-DP/ I/ 2008 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers ketentuan dalam peraturan dewan pers yang berkaitan dengan fungsi mediasi tercantum dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatakan:

“Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam petrnnyataan perdamaian”.

Sekalipun tidak tercantum kata “mediasi”, secara konseptual kata-kata dalam pasal tersebut mencerminkan peran atau fungsi mediasi yang dijalankan oleh dewan pers.⁴²

4. Pers Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Berbicara tentang pers dalam sistem pemerintahan tidak terlepas dari sistem pers yang dianut dalam suatu negara. Bahwa sistem pers yang dianut dalam suatu negara merupakan bagian atau susbsistem dari sistem komunikasi. Sedangkan sistem komunikasi itu sendiri merupakan bagian suatu sistem sosial dan politik. Oleh karena itu untuk mengetahui hubungan pemerintah dan media kita tidak bisa lepas dari bentuk sistem

⁴¹ Takdir Rahmadi. Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 96

⁴² Ibid., hlm. 74

sosial dan bentuk pemerintahan suatu negara dimana sistem pers itu berada dan berfungsi.

Sistem adalah seperangkat atau kesatuan objek, yang mana satu objek dengan objek yang lain saling berkaitan, bahkan saling bergantung. Sistem sosial Indonesia terdiri dari beberapa subsistem seperti subsistem ideologi, politik, ekonomi, budaya, komunikasi, pertahanan, dan keamanan. Subsistem satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, namun subsistem ideologi dan politiklah yang paling mempengaruhi subsistem yang lainnya termasuk subsistem media massa. Dengan demikian, sistem media massa mencerminkan falsafah dan sistem politik negara dimana dia berfungsi.⁴³

Apabila pers ditempatkan ke dalam kedudukannya sebagai pelaku dan kekuatan sosial politik masyarakat yang berhadapan dengan kekuatan politik negara, maka ukuran yang dipakai untuk menilai kuat lemahnya posisi pers adalah sejauh manakah pers mempunyai peran atau pengaruh dalam pembentukan kebijakan politik. Terdapat dua proposisi yang dapat dilihat disini.⁴⁴ Pertama, Apabila kedudukan politik negara dominan/kuat, maka pers berserta kekuatan-kekuatan politik non negara yang lainnya menjadi sub-ordinan (lemah) dalam pembentukan kebijakan politik. Artinya posisi politik pers lemah. Kedua, apabila kedudukan politik masyarakat, termasuk pers, dominan (kuat) dalam pembentukan

⁴³ Oтынunu 2012. *Media massa dan system pemerintahan*. Dikutip pada laman website: <http://otynunu.blogspot.com/2012/12/media-massa-dan-sistem-pemerintahan.html> (diakses pada hari Selasa, 22 Oktober 2013 pk. 12:50 Wita)

⁴⁴ Ibid.,

kebijakan politik tertentu, maka negara menjadi “sub-ordinan”. Artinya posisi politik pers kuat.

Media massa sering disebut sebagai kekuasaan keempat dalam pemerintahan setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Istilah itu menunjukkan bahwa media massa merupakan alat pengawas pemerintah (watch dog). Pandangan Ithel De Sola Pool tentang hubungan pemerintah dan media sangat diametral dalam posisi yang saling berhadap-hadapan.

a. Perkembangan Pers di Indonesia

1. Pers di Era Kolonial (tahun 1744 sampai awal abad 19)

Era kolonial memiliki batasan hingga akhir abad 19. Pada mulanya pemerintahan kolonial Belanda menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda kemudian masyarakat Indo Raya dan Cian juga menerbitkan surat kabar dalam bahasa Belanda, Cina dan bahasa daerah. Dalam era ini dapat diketahui bahwa *Bataviasche Nuvelles en politique Raisonnementen* yang terbit pada Agustus 1744 di Batavia (Jakarta) merupakan surat kabar pertama di Indonesia. Namun pada Juni 1776 surat kabar ini dibredel. Sampai pertengahan abad 19, setidaknya ada 30 surat kabar yang diterbitkan dalam bahasa Belanda, 27 surat kabar berbahasa Indonesia dan satu surat kabar berbahasa Jawa.⁴⁵

2. Pers di masa Penjajahan Jepang (1942 - 1945)

⁴⁵ Aulia 2012. *Pers di Indonesia*. Dikutip pada laman website: <http://edukasi.kompasiana.com/2012/09/26/pers-indonesia-dari-masa-ke-masa-496777.html> (diakses pada hari Selasa, 22 Oktober 2013 pkl. 14.50 Wita)

Era ini berlangsung dari 1942 hingga 1945. orang-orang surat kabar (pers) Indonesia banyak yang berjuang tidak dengan ketajaman penanya melainkan dengan jalan lain seperti organisasi keagamaan, pendidikan dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Jepang pers Indonesia tertekan. Surat kabar yang beredar pada zaman penjajahan Belanda dilarang beredar. Pada era ini pers Indonesia mengalami kemajuan dalam hal teknis dan juga mulai diberlakukannya izin penerbitan pers. Selain itu Jepang juga mendirikan Jawa Shinbun Kai dan cabang kantor berita Domei dengan menggabungkan dua kantor berita yang ada di Indonesia yakni Aneta dan Antara. Selama masa ini, terbit beberapa media (harian), yaitu: Asia Raya di Jakarta, Sinar Baru di Semarang, Suara Asia di Surabaya, Tjahaya di Bandung.⁴⁶

3. Pers dimasa Orde Lama atau Pers Terpimpin (1957 - 1965)

Lebih kurang 10 hari setelah Dekrit Presiden RI menyatakan kembali ke UUD 1945, tindakan tekanan pers terus berlangsung, yaitu pembredelan terhadap kantor berita PIA dan surat kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia, dan Sin Po dilakukan oleh penguasa perang Jakarta. Hal ini tercermin dari pidato Menteri Muda Penerangan Maladi dalam menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-14, antara lain: "Hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak berpikir,

⁴⁶ Ibid.,

menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana dijamin UUD 1945 harus ada batasnya: keamanan negara, kepentingan bangsa, moral dan kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa". Awal tahun 1960 penekanan kebebasan pers diawali dengan peringatan Menteri Muda Maladi bahwa "langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat kabar, majalah-majalah, dan kantor-kantor berita yang tidak menaati peraturan yang diperlukan dalam usaha menerbitkan pers nasional". Masih tahun 1960 penguasa perang mulai mengenakan sanksi-sanksi perizinan terhadap pers. Tahun 1964 kondisi kebebasan pers makin buruk: digambarkan oleh E.C. Smith dengan mengutip dari Army Handbook bahwa Kementerian Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan pers. Perubahan ada hampir tidak lebih sekedar perubahan sumber wewenang, karena sensor tetap ketat dan dilakukan secara sepihak.⁴⁷

4. Pers di era demokrasi Pancasila dan Orde lama

Awal masa kepemimpinan pemerintahan Orde Baru bahwa akan membuang jauh-jauh praktik demokrasi terpimpin dan mengganti demokrasi Pancasila. Pernyataan ini membuat semua tokoh bangsa Indonesia menyambut dengan antusias sehingga lahirlah istilah pers Pancasila. Pemerintah Orde Baru sangat menekankan pentingnya pemahaman tentang pers pancasila. Dalam rumusan Sidang Pleno

⁴⁷ Ibid.,

XXV Dewan Pers (Desember 1984), pers pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkahlakunya didasarkan nilai-nilai pancasila dan UUD'45. Hakikat pers pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Masa "bulan madu" antara pers dan pemerintah ketika dipermanis dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pers (UUPP) Nomor 11 tahun 1966, yang dijamin tidak ada sensor dan pembredelan, serta penegasan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif dan tidak diperlukan surat izin terbit. Kemesraan ini hanya berlangsung kurang lebih delapan tahun karena sejak terjadinya "Peristiwa Malari" (Peristiwa Lima Belas Januari 1974), kebebasan pers mengalami set-back (kembali seperti zaman Orde Lama).⁴⁸

5. Pers di masa pasca Reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998 orde baru tumbang dan mulailah era reformasi. Tuntutan reformasi bergema ke semua sektor kehidupan, termasuk sektor kehidupan pers. Selama rezim orde lama dan ditambah dengan 32 tahun di bawah rezim orde baru, pers Indonesia tidak berdaya karena senantiasa ada di bawah bayang-bayang ancaman pencabutan surat izin terbit. Sejak masa reformasi tahun

⁴⁸ Ibid.,

1998, pers nasional kembali menikmati kebebasan pers. Hal ini sejalan dengan alam reformasi, keterbukaan, dan demokrasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia. Akibatnya, awal reformasi banyak bermunculan penerbitan pers atau koran, majalah, atau tabloid baru. Di Era reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini disambut gembira dikalangan pers, karena tercatat beberapa kemajuan penting dibanding dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers (UUPP).⁴⁹

Dalam Undang-Undang ini, dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara (pasal 4). Itulah sebabnya mengapa tidak lagi disinggung perlu tidaknya surat ijin terbit, yaitu terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2. Pada masa reformasi, Undang-Undang tentang pers No. 40 tahun 1999, maka pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:⁵⁰

- a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.

⁴⁹ Ibid.,

⁵⁰ Lihat, pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

- b) Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- c) Mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- d) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
- f) Mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai mnejadi saksi di pengadilan.

5. Regulasi Tentang Pers

Aturan yang menjelaskan tentang pers atau media massa tidak semua terkumpul dalam satu undang-undang tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan sifat media massa yang mencakup ideologi dan politik yang fundamental. Hukum yang mengatur tentang media massa misalnya saja terdapat dalam, UUD 1945; Tap MPR No. XVII/ MPR/1998; Kitab UU Hukum Pidana, UU Anti Monopoli, UU Telekomunikasi, dan sebagainya.⁵¹

⁵¹ Hari Wiriawan, loc. cit.

Peraturan perundang-undangan tersebut bukan merupakan peraturan hukum yang mengatur secara khusus dibidang media massa.

a. UUD 1945

UUD 1945 memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang didalamnya juga menyinggung mengenai kebebasan media. Seperti pada pasal 28 huruf F UUD 1945:⁵²

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan berbicara dan kebebasan pers disamping merupakan hak masyarakat dalam konteks hubungan negara dengan masyarakat, hal ini juga untuk kepentingan negara secara keseluruhan. Kemampuan masyarakat untuk memberikan respon bukan dalam arti kemampuan teknik berkomunikasi, melainkan kemampuan secara politis dimana rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk berbicara. Hak dan kebebasan itulah yang harus dijamin secara hukum dalam hal ini hukum yang tertinggi yaitu undang-undang dasar atau konstitusi.⁵³

⁵² Lihat, pasal 28 Huruf F Undang-Undang Dasar 1945.

⁵³ Hari Wiriawan, loc. Cit.

b. Tap MPR RI No. XVIII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusi

Produk hukum Majelis Permusyawaratan rakyat (Tap MPR) sudah tidak merupakan suatu hukum yang mengikat bagi masyarakat secara umum, seiring dengan makin melemahnya kekuasaan MPR menurut UUD 1945. Saat ini Tap MPR memang tidak tercantum sebagai salah satu peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, Tap MPR RI No. XVIII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusi dicantumkan karena memiliki makna historis bahwa tap tersebut adalah produk hukum pertama di Indonesia yang mengakui secara formal hak asasi manusia sejak masa orde baru. Tap tersebut kemudian yang mengilhami lahirnya UU HAM, UU Pers dan Perubahan UUD 1945 sehingga sejalan dengan semangat penghargaan terhadap HAM.⁵⁴

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang ini sebenarnya tidak ditujukan untuk mengatur media melainkan untuk mengatur kegiatan unjuk rasa dan perlindungan terhadap hak untuk menyatakan pendapat di depan umum. Atau lebih tepat jika digolongkan kedalam bagian yang mengatur media secara struktural. Namun, disisi lain ketentuan mengenai menyampaikan pendapat di muka umum bisa

⁵⁴ Ibid.,

pula disamakan dengan ketentuan mengenai kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat (*freedom of expression*).⁵⁵

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pers sebagai lembaga profesional memiliki landasan hukum yang berperan sebagai pelindung sekaligus pedoman bagi pers untuk melakukan kegiatan jurnalistik yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Landasan hukum itu dibuat dilandasi tingkat hukum universal yang lebih luas mengenai hak-hak untuk memiliki kebebasan berpendapat, aturan atau undang-undang pers suatu negara, hingga turunannya yang terkecil yaitu kode etik wartawan sebuah negara, bahkan sebuah media.

Mengenai pembentukannya, hukum pers tidak dilepaskan dari konteks tempat dan waktu saat hukum pers itu dibuat. Hal itu membuat hukum pers bukan merupakan sesuatu yang final dan tetap. Hukum pers selalu berubah mengikuti kondisi sosial politik ekonomi sebuah negara. Seperti di Indonesia, hukum pers telah berubah beberapa kali sesuai dengan kekuasaan suatu rezim dan hal ini membentuk suatu pola hubungan antara pers dan pemerintah. Indonesia memiliki pengalaman kehidupan pers sejak beberapa puluh tahun sebelum kemerdekaannya. Kira-kira sejarah

⁵⁵ Ibid.,

pers Indonesia dimulai pada abad 19 ketika Indonesia menjadi koloni Belanda yang kerap dinamakan pers Hindia Belanda.⁵⁶

Dari sejarah yang tercatat kaitannya dengan perundang-undangan mengenai pers, pada era kepemimpinan Soekarno, UU tentang pers juga pernah mengalami beberapa kali perubahan. dimulai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Kemudian undang-undang ini ditambah menjadi undang-undang nomor 4 tahun 1967 tentang penambahan undang-undang Nomor 11 Tahun 1966. Selanjutnya diubah lagi menjadi UU No. 21 Tahun 1982.⁵⁷

Undang-undang yang baru diubah setelah kejatuhan era Orde Baru yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto mengindikasikan perubahan sesuai dengan cita-cita reformasi yang mendambakan kehidupan berdemokrasi. Hal ini dapat dilihat pada bagian pertimbangan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang menekankan: bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.⁵⁸

⁵⁶ A. Mignolo. 2009. *Undang-Undang Pers*. Dikutip pada laman website: <http://catatancalonwartawan.wordpress.com/tag/undang-undang-pers/> (diakses pada hari Rabu, 23 Oktober 2013 pk1 06.45 Wita)

⁵⁷ Edi Susanto. *Hukum Pers di Indonesia*. Hlm. 1

⁵⁸ A. Mignolo. Loc.cit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Dewan Pers Nasional.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan mengkaji persoalan-persoalan substansial atau mengkaji prinsip-prinsip umum sebuah masalah untuk menemukan akar permasalahan yang akan diturunkan menjadi sebuah bentuk paradigma baru dalam penyusunan sebuah solusi.

Dalam penelitian kualitatif, model berfikir yang digunakan adalah deduktif. Dalam arti, bahwa pengkajian yang dilakukan diawali dari pengkajian prinsip-prinsip umum sesuatu dan implikasi prinsip-prinsip umum tersebut pada ranah praktis. Karena persoalan implementasi adalah persoalan yang menyangkut relasi antara teori dan praktek.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu Pendekatan Teoritis. Yakni, model pengkajian sebuah persoalan dengan menggunakan analisis teoritis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memaparkan beberapa teori yang berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas dan menganalisis implikasi dari setiap teori tersebut dalam ranah praktis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*) yang dilakukan pada narasumber yang terdapat pada lokasi penelitian.
2. Telaah pustaka (*Library research*), pengumpulan intisari dari dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari internet atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis data yang bersumber dari:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, penulis peroleh berbagai literature-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan Pers atau Media Massa.

E. Analisis Data

Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa.

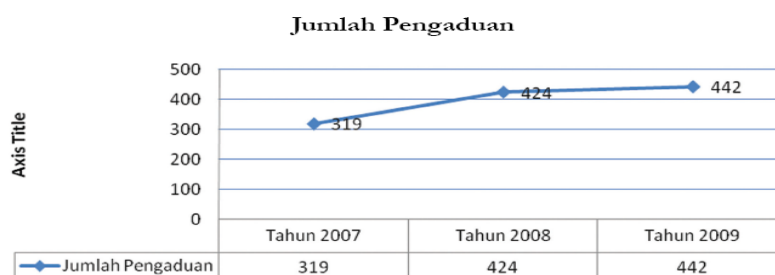
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa Dewan Pers sebagai lembaga yang independen. Dimana Dewan pers terus berupaya menjalankan fungsi-fungsi publik yang diamanahkan oleh undang-undang pers. Fungsi-fungsi tersebut menempatkan dewan pers sebagai penjaga kemerdekaan atau kebebasan pers, sebagai penegak etika pers, sebagai mediator penyelesaian permasalahan antara pers dan masyarakat, serta sebagai pranata pendidikan pers.

Dalam penyelesaian sengketa pers, sering kali harus berhadapan dengan ketentuan hukum pidana yang dimana pertanggungjawabannya secara pidana pula. Hal inilah yang mendasari pentingnya peranan Dewan Pers dalam penyelesaian kasus sengketa pers guna menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers. Tidak sedikit anggota masyarakat yang mengeluh karena merasa dirugikan akibat kemerdekaan pers. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengaduan yang masuk dari tahun ketahun. Data menunjukkan, jumlah pengaduan ke Dewan Pers meningkat dari 319 di tahun 2007 menjadi 424 pada tahun 2008 dan 442 di tahun 2009. Dengan kata lain, tahun 2007 Komisi Pengaduan menerima rata-rata 26

pengaduan perbulan, 34 lebih perbulan di tahun 2008, dan 36 perbulan tahun 2009.

Adapun Perkembangan Pengaduan Selama tahun 2007 hingga tahun 2009:

Perkembangan Pengaduan Tahun 2007 Hingga 2009
Perkembangan jumlah pengaduan selama periode 2007 hingga 2009 sebagai berikut:



Diolah dari data dewan pers tahun 2007-2009

Dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun jumlah pengaduan kedewan pers semakin meningkat. Sementara, untuk tahun 2010 sejak Februari hingga November, Dewan Pers menerima 421 pengaduan, terdiri atas 117 pengaduan langsung dan 304 tembusan. Dari pengaduan tersebut, terutama pengaduan langsung, sebanyak 38 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers, di Jakarta atau di daerah. Sisanya diselesaikan melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait. Di luar itu, Dewan Pers juga menangani beberapa kasus etika pers tanpa adanya pengaduan dari masyarakat. Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan Dewan adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen menyatakan media atau jurnalis melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi

yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan pelanggaran kode etik.

Kemudian pada tahun 2011 jumlah pengaduan mencapai 593 pengaduan, dengan kategori pengaduan langsung 157, pengaduan tembusan sebanyak 345, dan permintaan pendapat dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebanyak 9 pengaduan. Sementara Pada periode Januari-September tahun 2012, Dewan Pers menerima 347 pengaduan, terdiri atas 122 pengaduan langsung, 200 surat tembusan dan 17 permintaan pendapat Dewan Pers dari KPI Pusat.

Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap media diawali oleh tindakan atau perilaku jurnalis yang melanggar prinsip profesionalisme dan kode etik jurnalistik. Kekerasan terhadap wartawan merupakan reaksi atas tindakan tidak profesional wartawan sendiri, seperti: menghina narasumber, melanggar privasi, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap sumber berita. Perlu perbaikan kualitas pemahaman dan praktek kode etik jurnalistik, rasa tanggung jawab dan disiplin profesi di kalangan jurnalis melalui proses-proses sosialisasi dan pelatihan jurnalistik. Dalam konteks yang sama, kekerasan terhadap media juga harus menjadi tanggung jawab perusahaan media. Media harus membekali jurnalis dengan pemahaman komprehensif tentang etika dan profesionalisme dan tidak membebani wartawannya dengan tuntutan kerja tak masuk akal

sehingga mengondisikan mereka untuk mengabaikan etika peliputan. Tidak dapat disangkal persaingan antar media untuk mendapatkan berita aktual dan eksklusif kian ketat.

Dewan Pers dalam hal ini Yosep Adi Prasetyo sebagai salah satu anggota dewan pers dari unsur tokoh masyarakat selaku ketua komisi hukum berpendapat, Kedudukan dewan pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers adalah sebagai lembaga mediasi atas sengketa pemberitaan pers, dimana keputusannya sama dengan kedudukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sah, dan mengikat sebagai putusan akhir, yang efektifitasnya bergantung kepada itikad baik Para Pihak yang bersengketa dalam sengketa pers tersebut. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:⁵⁹

“Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”.

Dan ayat (2), yang berbunyi:

“Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) penyelidikan dan penyidikan; b) penuntutan; c) pelaksanaan putusan; d) pemberian jasa hukum; dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”

Kemudian pada Pasal 60 Ayat (1) yang menyatakan:

“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

⁵⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 38.

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Kemudian pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa:⁶⁰

“Semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lem-baga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni, penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan:

“Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.

⁶⁰ Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam artian, Dewan Pers melakukan peranannya sebagai mediator, dalam hal ini Dewan Pers lebih banyak mendengar keinginan para pihak posisi dewan pers disini hanya sebagai penengah. Kemudian sebagai fasilitator, disini dewan pers memberikan pertimbangan terhadap alternatif-alternatif yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian Dewan Pers juga dapat melakukan Ajudikasi atau Dewan Pers sebagai “hakim” mengambil keputusan terhadap kasus yang diperiksanya. Ajudikasi merupakan cara penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga peradilan (non-ajudikasi berarti di luar pengadilan).

Dalam penyelesaian sengketa pers yang mengacu pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalis ini, peranan Dewan Pers sangatlah penting dalam kehidupan pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers adalah menerima seluruh laporan dan pengaduan baik itu dari masyarakat, pemerintah, ataupun pers itu sendiri. Dalam penyelesaian sengketa pers yang dilaporkan atau diadukan tersebut Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi.

Bila tidak tercapai titik temu antara kedua belah pihak, Dewan Pers kemudian mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang disampaikan kepada kedua pihak yang bersengketa. PPR itu juga dimuat di buletin ETIKA dan website Dewan Pers (*www.dewanpers.or.id* dan *www.dewanpers.org*) yang dapat diunduh oleh siapa pun.

Permasalahan kemudian yang menjadi penghambat Dewan Pers dalam menyelesaikan kasusnya, terkadang Pelapor atau si pengadu setelah memberikan laporan atau pengaduan bersikap kurang kooperatif terhadap Dewan Pers. Laporan dan pengaduan yang disampaikan ke Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan Dewan Pers ternyata telah di laporkan ke polisi atau kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan. Kurangnya pemahaman pengadu terhadap pesan-pesan media pers. Si pengadu dalam mengajukan tuntutan ganti rugi tidak proporsional. Kesalahpahaman antara pihak yang bersengketa ketika proses mediasi berlangsung.

Dewan Pers selalu menekankan supaya masyarakat menggunakan Hak Jawab mereka. Dengan demikian akan ada referensi tertulis atau terekam bahwa berita yang keliru itu pernah dibantah dan diluruskan. Kalau tidak ada referensi tertulis atau terekam, maka masyarakat bahkan anak-cucu orang atau lembaga bersangkutan akan beranggapan bahwa berita itu benar adanya, karena tidak pernah dibantah.

Karena itu, setiap kali ada berita yang merugikan, Dewan Pers menganjurkan segera digunakan Hak Jawab secara proporsional. Bantah setiap paragraf atau bagian yang tidak benar dengan fakta-fakta yang relevan, dan mengirim tembusannya ke Dewan Pers.

Dalam menilai pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers memilah berdasarkan bobot pelanggaran, apakah pelanggaran itu kesengajaan atau kelalaian. Jika hanya kelalaian, maka media pers

diminta untuk melayani Hak Jawab. Namun, jika terdapat unsur kesengajaan, media pers tersebut harus meminta maaf.

1. Dewan Pers

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.⁶¹

⁶¹ Wiki. 2013. *Dewan Pers*. Dikutip pada laman website: http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers (diakses pada hari Rabu, 18 Februari 2013 pk. 00.12 Wita)

a. Keanggotaan Dewan Pers

Untuk periode 2013-2016, anggota Dewan Pers adalah:⁶²

1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (unsur tokoh masyarakat)
2. Drs. Margiono (unsur wartawan)
3. Anthonius Jimmy Silalahi (Unnsur pimpinan perusahaan)
4. Imam Wahyudi (unsur wartawan)
5. I made Ray Karuna Wijaya (unsur pimpinan perusahaan)
6. Ir. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A (unsur pimpinan perusahaan pers)
7. Nezar Patria (unsur wartawan)
8. Ninok Leksono (unsur toko masyarakat)
9. Yosep Adi Prasetyo (unsur toko masyarakat)

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk periode 2013-2016 Dewan Pers terdiri atas beberapa komisi, yakni:⁶³

Ketua Dewan Pers : Bagir Manan

Wakil Ketua Dewan Pers: Margiono

1. Komisi Pengaduan Masyarakat

Penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf c: *“Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik,”* dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf d: *“Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian*

⁶² Dewan Pers. *Dewan Pers Periode 2013-2016*. (Jakarta: Dewan Pers, 2013)

⁶³ Ibid.,

pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.

Ketua Komisi: M. Ridlo Eisy

Wakil Ketua: - Yosep Adi Prasetyo

- Imam Wahyudi

- Nezar Patria

2. Komisi Hukum

Penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf a: *“Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain”* dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf f: *“Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers”.*

Ketua Komisi: Yosep Adi Prasetyo

Wakil Ketua: - Jimmy Silalahi

- M. Ridlo Eisy

3. Komisi Pengembangan Profesi Wartawan, Penelitian dan

Pendataan Perusahaan Pers

Penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf b: *“Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers,”* Pasal 15 Ayat (2) Huruf f: *“...meningkatkan kualitas profesi kewartawanan,”* dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf g: *“Mendata perusahaan pers”.*

Ketua Komisi: Ninok Leksono

Wakil Ketua : - Imam Wahyudi

- Ray Wijaya

4. Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri

Penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf e: *“Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.”*

Ketua Komisi: Nezar Patria

Wakil Ketua : - Jimmy Silalahi

- Ninok Leksono

- Ray Wijaya

Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 1999 tentang Pers, anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali. Anggota Dewan Pers terdiri atas:

1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan
3. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

b. Sumber Pembiayaan Dewan Pers

Berdasarkan hasil Penelitian, pembiayaan Dewan Pers bersumber dari Organisasi Wartawan, Organisasi Perusahaan Pers, bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. Menurut Dewan Pers, Sumbangan dari Organisasi Wartawan dan Organisasi perusahaan pers masih sulit diandalkan, bagi organisasi wartawan, Jangankan menyumbang Dewan Pers untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari saja mereka masih kesulitan dana.

Hingga saat ini Dewan Pers mendapatkan dana berkat bantuan dari negara dan sumbangan yang tidak mengikat lainnya. Dan pengelolaan dana bantuan dari negara tersebut dikelola oleh sekretariat yang tidak mencampuri kebijakan Dewan Pers. Begitu juga dana sumbangan dari pihak lain dialirkan berdasarkan kebutuhan Dewan Pers, dan tidak boleh memberikan ikatan-ikatan yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh dewan pers.

2. Data Pengaduan ke Dewan Pers

Dalam prakteknya, pelaporan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers serta menyampaikan usulan dan saran kepada dewan pers dalam rangka meningkatkan kualitas pers nasional dapat dilihat data yang dikemukakan oleh dewan pers sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Pers tahun 2008-2012

No	Tahun	Jumlah Pengaduan
1.	2007	319
2.	2008	424
3.	2009	442
4.	2010	421
5.	2011	593
6.	2012	347
Jumlah		2.546

Sumber: Arsip Dewan Pers Nasional

Dari data tersebut terlihat, bahwa pada tahun 2007 – 2009 jumlah pengaduan meningkat. Namun, pada tahun 2010 mengalami penurunan jumlah pengaduan yaitu hanya sebanyak 421. Kemudian kembali meningkat lagi pada tahun 2011, jumlah pengaduan mencapai 593 pengaduan. Dan kembali menurun lagi pada tahun 2012 yaitu hanya mencapai 347 pengaduan.

Kemudian untuk kategori pengaduan ke dewan pers pada tahun 2011 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Kategori Pengaduan ke dewan pers pada tahun 2011

No	Kategori Pengaduan	Jumlah
1	Pengaduan langsung	157
2	Pengaduan Tembusan	345
3	Permintaan Pendapat dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	9
Jumlah		593

Sumber: Arsip Dewan Pers

Penanganan dan penyelesaian, dalam menangani pengaduan pelanggaran Kode Etik, secara prinsip Dewan Pers bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pers. Proses ini merupakan penanganan secaramediasi dengan menekankan padaa tercapainya penyelesaian melalui musyawarah antara pihak pengadu dan pengelola pers yang diadakan. Pada tabel berikut, ada beberapa jenis pengaduan untuk tahun 2011.

Tabel 3. Jenis Pengaduan ke Dewan Pers

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Mengadukan berita	88
2.	Kekerasan terhadap wartawan	11
3.	Mengadukan perilaku wartawan	14
4.	Menghalangi wartawan	5
5.	Pemuatan hak jawab tidak memuaskan	
6	Hak jawab tidak dimuat	4
7	Wartawan/media digugat karena berita	4
8	UU Pers tidak digunakan oleh penegak hukum	1
9	Sengketa hak cipta nama media	1
10	Mengadukan kartun	1
11	Digugat karena menulis surat pembaca	1
12	Tidak terkait pers	3
13	Mengadukan artikel/opini	3
14	Wartawan mengadukan pemecatan/pemutusan hubungan kerja	3
15	Mengadukan iklan	5
16	Mengadukan surat pembaca	2
17	Mengadukan foto	1
18	Mengadukan foto vulgar	1
19	Mengadukan badan hukum perusahaan pers	2
20	Meminta pendapat sesuai UU Pers	1
21	Meminta pendapat sesuai etik jurnalistik	11
22	Pemutusan kerjasama dengan media	1

23	Mengadukan putusan pengadilan	2
24	Mengadukan penyensoran	1
25	Meminta bantuan mediasi sengketa ketenagakerjaan	1

Sember: Arsi Dewan Pers

Tabel di atas menerangkan, bahwa dalam satu kasus bisa memuat beberapa jenis pengaduan. Contohnya: mengadukan berita dan badan hukum pers. Kemudian latar belakang pengaduan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Latar Belakang Pihak Pengadu

No	Pengadu	Jumlah
1	Masyarakat	60
2	Wartawan/Media	24
3	Pemerintah/Pejabat pemerintah	21
4	Perusahaan/Pengusaha	8
5	Rumah Sakit	2
6	Organisasi wartawan/pers	5
7	Organisasi/lembaga kemasyarakatan/LSM	6
8	Anggota parlemen	2
9	Organisasi olahraga	1
10	Organisasi mahasiswa	1
11	Perguruan tinggi/sekolah/guru	8
12	Lembaga negara	10
13	Partai politik/tokoh politik	4
14	Polisi/Kepolisian	2
15	Pengacara	1
16	Artis	2
	Jumlah	157

Sumber: Arsip Dewan Pers

Selanjutnya laporan komisi pengaduan masyarakat dan penegakan etika pers Dewan Pers tahun 2011 ialah, mengenai penanganan dan penyelesaian berupa mediasi dan melalui surat menyurat atau komunikasi. Untuk penanganan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5. Bentuk Penyelesaian Pengaduan Langsung

No.	Bentuk Penyelesaian	Jumlah
1	Mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR)	10
2	Melalui Mediasi	25
3	Melalui surat menyurat dan atau komunikasi	92
4	Pemberian Pendapat kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	9
	Jumlah	143

Sumber: Arsip Dewan Pers

Hingga data diatas dibuat pada minggu pertama Januari 2012, beberapa pengaduan belum dapat diselesaikan. Kemudian untuk penyelesaian sengketa, ketika kedua belah pihak tidak menemukan hasil dari musyawarah maka penyelesaian dilakukan dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) setelah melakukan pengujian dan penelitian yang seksama. Berikut data penilaian dari Dewan Pers tahun 2011.

Tabel 6. Penilaian Dewan Pers Atas Pengaduan

No	Jenis Penilaian	Jumlah
1	Melanggar Kode Etik Jurnalistik	77
2	Tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik	13
3	Kasus pers yang diadukan yang bukan terkait etika	24
4	Bukan kasus pers	9
5	Pengaduan yang tidak jelas pengadu dan yang diadukan	20
	Jumlah kasus	143

Sumber: Arsip Dewan Pers

Ket: sampai data ini dibuat pada minggu pertama Januari 2012, beberapa belum selesai ditangani.

Pada periode Januari-September tahun 2012, Dewan Pers menerima 347 pengaduan, terdiri atas 122 pengaduan langsung, 200 surat tembusan dan 17 permintaan pendapat Dewan Pers dari KPI Pusat (lihat Tabel I). Pengaduan langsung berarti pihak-pihak mengajukan pengaduan tentang pemberitaan atau perilaku pers melalui surat atau dengan datang langsung ke Dewan Pers. Pengadu yang datang langsung ke Dewan Pers akan diminta untuk mengisi form pengaduan. Belakangan juga semakin banyak pengaduan online yang dilakukan dengan mengisi form pengaduan yang tersedia pada website dewan pers. Sesuai dengan prosedur baku penyelesaian masalah jurnalistik, Dewan Pers selalu menyarankan agar sebelum mengajukan pengaduan ke Dewan Pers, pihak-pihak yang merasa dirugikan pers terlebih dahulu mengajukan komplain kepada pers yang bersangkutan secara langsung. Jika komplain tersebut tidak ditangani dengan baik atau jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak dengan pers, baru kemudian masalahnya

diadukan ke Dewan Pers. Sungguh pun demikian, Dewan Pers tetap menangani pengaduan-pengaduan langsung ke Dewan Pers yang tanpa melalui proses pengajuan komplain kepada media terlebih dahulu. Beberapa kasus menunjukkan, jika pengaduan seperti ini tidak ditangani akan mendorong pihak-pihak untuk membawa masalah jurnalistik ke ranah hukum.

Tabel 7. Pengaduan ke Dewan Pers Januari – September 2012

Kategori Pengaduan	Frek
Pengaduan Tembusan	200
Pengaduan Langsung	122
Permintaan Pendapat oleh KPI	17
Lain-lain	8
Total	347

Sumber: Arsip Dewan Pers

Jika dibandingkan dengan total jumlah pengaduan ke Dewan Pers tahun 2011 yang mencapai 593 pengaduan, tampaknya terjadi peningkatan angka pengaduan pada tahun 2012. Hingga bulan September 2012, Dewan Pers sudah menerima total 347 pengaduan. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan, jumlah pengaduan mengalami peningkatan signifikan pada periode Oktober-Desember.

Berdasarkan hasil penelitian, banyaknya pengaduan ke Dewan Pers dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, hal ini menunjukkan

peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan masalahmasalah pemberitaan media dan penegakan kode etik jurnalistik dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dengan kata lain banyaknya pengaduan ke Dewan Pers dapat dilihat sebagai peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik melalui Dewan Pers, dan bukan melalui jalur hukum secara langsung. Pada sisi ini, tingginya angka pengaduan pers ke Dewan Pers adalah perkembangan positif yang patut disyukuri karena dapat mereduksi potensi kriminalisasi pers.

Namun di sisi lain, banyaknya pengaduan ke Dewan Pers menunjukkan ada masalah serius di dalam jurnalisme kita, ada banyak masalah dalam penegakan kode etik jurnalistik di Indonesia. Tingginya angka pengaduan jurnalistik ke Dewan Pers menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan media dan banyaknya pihak yang merasa dirugikan olehnya. Data hasil penyelesaian masalah jurnalistik di Dewan Pers menunjukkan, 70 persen kasus yang ditangani Dewan Pers berakhir dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media atau wartawan. Dengan kata lain, jika data penyelesaian masalah jurnalistik di Dewan Pers yang menjadi titik tolak, dapat dikatakan bahwa tingkat pelanggaran KEJ masih tinggi atau sebaliknya, tingkat ketaatan pers Indonesia terhadap KEJ masih rendah. Seperti yang tergambar pada tabel berikut.

Tabel 8. Jenis Pengaduan ke Dewan Pers Januari – September 2012

Jenis Pengaduan	Frek
Pengajuan Hak Jawab	170
Pengaduan tentang Berita Secara Umum	81
Permintaan Pendapat Dewan Pers Berdasarkan UU Pers/Kode Etik Jurnalistik	19
Pengajuan Hak Koreksi	14
Pengaduan tentang Kekerasan terhadap Wartawan	10
Pengaduan Isi Siaran Televisi	9
Pengaduan tentang Perilaku/ Tindakan Wartawan	6
Sengketa Hak Cipta Nama Media	5
Pengaduan tentang Iklan	4
Pengaduan tentang Foto/Illustrasi/Kartun	3
Pengaduan Wartawan/Media Digugat ke Polisi/Pengadilan karena Berita	3
Pengaduan tentang Pemecatan/PHK terhadap Wartawan	2
Pengaduan tentang Artikel/Opini/Surat Pembaca	1
Pengaduan Penyensoran	1
Pengaduan tentang Badan Hukum Perusahaan Pers	1
Lain-lain	22
Total	351

Sumber: Arsip Dewan Pers

Keterangan: Dalam satu pengaduan dapat mengandung lebih dari satu jenis pengaduan.

Tabel 9. Jenis Pengaduan Berdasarkan Kategori Pengaduan ke

Dewan Pers 2012

Jenis Pengaduan	Kategori Pengaduan									
	Pengadu-an Langsung		Pengadu-an Tembusan		Permintaan Pendapat oleh KPI		Lain-lain		Total	
	Fre k	%	Fre k	%	Fre k	%	Fre k	%	Fre k	%
Pengaduan Hak Jawab	10	2.85	160	45.58	0	0.00	0	0.00	170	48.43
Pengaduan Hak Koreksi	0	0.00	14	3.99	0	0.00	0	0.00	14	3.99
Pengaduan tentang Berita Secara Umum	75	21.37	6	1.71	0	0.00	0	0.00	81	23.08
Pengaduan Isi Siaran Televisi	6	1.71	3	0.85	0	0.00	0	0.00	9	2.56
Pengaduan tentang Perilaku/Tindakan Wartawan	6	1.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1.71
Pengaduan tentang Kekerasan terhadap Wartawan	9	2.56	1	0.28	0	0.00	0	0.00	10	2.85
Pengaduan tentang Artikel/Opini/Surat Pembaca	0	0.00	1	0.28	0	0.00	0	0.00	1	0.28
Pengaduan tentang Foto/Illustrasi/Kartun	3	0.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.85
Pengaduan tentang Iklan	3	0.85	1	0.28	0	0.00	0	0.00	4	1.14
Pengaduan tentang Badan	1	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.28

Hukum Perusahaan Pers										
Pengaduan Wartawan/Media yang Digugat ke Polisi/Pengadilan karena Berita	1	0.28	0	0.00	0	0.00	2	0.57	3	0.85
Permintaan Pendapat Dewan Pers Berdasarkan UU Pers/KEJ	0	0.00	0	0.00	17	4.84	2	0.57	19	5.41
Sengketa Hak Cipta Nama Media	2	0.57	3	0.85	0	0.00	0	0.00	5	1.42
Pengaduan tentang Pemecatan/PHK terhadap Wartawan	1	0.28	0	0.00	0	0.00	1	0.28	2	0.57
Pengaduan tentang Penyensoran	1	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.28
Lain-lain	9	2.56	11	3.13	0	0.00	2	0.57	22	6.27
Total	127	36.18	200	56.98	17	4.84	7	1.99	351	100.00

Sumber: Arsip Dewan Pers

Tabel di atas menunjukkan dari seluruh total 347 pengaduan yang diterima Dewan Pers selama Januari - September 2012, pengaduan paling banyak berisi permintaan hak jawab kepada media, yakni sebanyak 170 pengaduan atau mencapai 48,71 persen. Hal ini menunjukkan, semakin banyak pengadu menyampaikan materi pengaduan yang

spesifik, yakni permintaan hak jawab atas berita yang dinilai tidak berimbang, tidak akurat, menghakimi dan lain-lain. Fakta ini perlu digarisbawahi karena mengindikasikan meningkatnya kesadaran berbagai pihak tentang duduk-perkara hak jawab dalam konteks penyelesaian sengketa pers. Jika semakin banyak pihak berharap sengketa pers diselesaikan dengan mekanisme hak jawab, ini menumbuhkan optimisme akan mereduksi potensipotensi kriminalisasi terhadap pers. Pada tahun 2012 hingga bulan September, jumlah pengaduan yang secara spesifik berisi permintaan hak jawab bahkan lebih tinggi dari jumlah pengaduan terhadap isi berita secara umum, yang mencapai angka 87 pengaduan (24,93 Persen).

Jumlah pengaduan yang berisi permintaan hak koreksi mencapai 14 kasus, sementara jumlah pengaduan tentang kekerasan terhadap wartawan mencapai 10 kasus. Perlu digarisbawahi, jumlah kasus kekerasan yang ditangani Dewan Pers sebenarnya jauh lebih banyak dari 10 kasus. Ada banyak kasus kekerasan yang tidak diadukan ke Dewan Pers, namun tetap ditangani oleh Dewan Pers bersama asosiasi wartawan seperti AJI, IJTI dan PWI.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengatur dua hal: Produk jurnalistik dan perilaku jurnalistik. Jadi yang berpotensi melanggar KEJ bukan hanya produk jurnalistik, bukan hanya berita, namun juga perilaku, sikap atau tindakan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Misalnya saja wartawan melanggar privasi, mengumpat sumber berita, melakukan

tindakan yang mengarah pada ancaman atau pemerasan terhadap sumber berita, membenturkan kamera terhadap tubuh sumber berita dan lain-lain. Dalam konteks inilah, pada periode 9 bulan pertama tahun 2012, Dewan Pers juga menerima 6 pengaduan tentang perilaku atau tindakan wartawan ketika menjalankan liputan jurnalistik yang dianggap melanggar etika pers atau melanggar tata-krama.

Table di atas juga menunjukkan, Dewan Pers pada tahun 2012 juga menerima pengaduan tentang wartawan yang terkena pemutusan hubungan kerja dari perusahaan medianya. Persoalannya adalah, Dewan pers adalah rejim etik yang tidak dapat masuk terlalu jauh ke dalam ranah hubungan industrial antara wartawan dan perusahaan medianya. Dewan Pers bersama asosiasi media dan asosiasi wartawan dapat merumuskan standard kesejahteraan wartawan karena masalah ini berpengaruh langsung terhadap kualitas pers secara menyeluruh. Namun Dewan Pers tidak dapat mengintervensi segi-segi hubungan industrial antara waratwan dan perusahaan medianya. Tabel berikut menunjukkan proses pengaduan ke Dewan Pers.

Tabel 9. Proses Pengaduan ke Dewan Pers (Januari – September 2012)

Proses Pengaduan	Frek	%
Tidak Diwakili Kuasa Hukum	312	89.91
Diwakili Kuasa Hukum	35	10.09
Total	347	100.00

Sumber: Arsip Dewan Pers

**Tabel 10. Proses Pengaduan ke Dewan Pers Berdasarkan Pengadu
(Januari – September 2012)**

Kategori Pengadu	Pengaduan Diwakili Kuasa Hukum					
	Diwakili		Tidak Diwakili		Total	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Pengusaha/Perusahaan	12	3.46	15	4.32	27	7.78
Masyarakat	7	2.02	40	11.53	47	13.54
Pejabat Publik	6	1.73	128	36.89	134	38.62
Artis	3	0.86	0	0.00	3	0.86
Wartawan/Media Cetak	2	0.58	21	6.05	23	6.63
Partai Politik/Tokoh Politik	1	0.29	3	0.86	4	1.15
Unsur TNI	1	0.29	2	0.58	3	0.86
Wartawan/Media Elektronik	0	0.00	8	2.31	8	2.31
Wartawan/Media Online	0	0.00	3	0.86	3	0.86
Organisasi Wartawan/Pers	0	0.00	12	3.46	12	3.46
Anggota DPR/DPRD	0	0.00	2	0.58	2	0.58
Polisi/Kepolisian	0	0.00	7	2.02	7	2.02
Organisasi Kemasyarakatan/LSM	0	0.00	16	4.61	16	4.61
Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan	0	0.00	14	4.03	14	4.03
Perguruan Tinggi/Sekolah/Guru/Peneliti	0	0.00	5	1.44	5	1.44
Badan Publik	0	0.00	25	7.20	25	7.20
Pengacara	0	0.00	5	1.44	5	1.44
Lainnya	3	0.86	6	1.73	9	2.59
Total	35	10.09	312	89.91	347	100.00

Sumber: Arsip Dewan Pers

Tabel 9. menunjukkan bahwa mayoritas pengadu (89,91 persen) tidak menggunakan kuasa hukum ketika mengirim surat pengaduan atau melakukan pengaduan langsung ke Dewan Pers. Hanya 10,9 persen

pengadu, atau 35 pengaduan yang menggunakan jasa kuasa hukum ketika berperkara di Dewan Pers. Tabel 10 dari 35 pengaduan ke Dewan Pers yang menggunakan jasa kuasa hukum, 12 pengaduan di antaranya dilakukan oleh kalangan pengusaha atau perusahaan swasta. Dari 27 pengaduan yang dilakukan kalangan pebisnis ini, 12 di antaranya menggunakan jasa kuasa hukum. Jasa kuasa hukum juga digunakan masyarakat (7 kasus), pejabat publik (6 kasus), artis (3 kasus), media cetak (2 kasus), partai politik (1 kasus), dan unsur TNI (1 kasus) ketika mengadu ke Dewan Pers.

Berdasarkan hasil penelitian, dari pengalaman kelompok kerja Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, posisi kuasa hukum adalah posisi yang unik dalam konteks penyelesaian sengketa jurnalistik. Di satu sisi, kuasa hukum berperan dalam memberikan pemahaman tentang hukum pers dan kedudukan KEJ kepada pengadu. Namun di sisi lain, tidak jarang peran kuasa hukum justru menambah kompleks proses penyelesaian sengketa pers. Misalnya saja, ada kuasa hukum yang berpendapat bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik di Dewan Pers tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa tersebut dapat diajukan ke jalur hukum pidana atau perdata. Sedangkan Dewan Pers dan komunitas pers berpendapat bahwa masalah jurnalistik harus diselesaikan secara jurnalistik pula. Jika persoalan jurnalistik dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian Dewan Pers, maka masalah tersebut tidak dapat diajukan ke jalur hukum. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengacara

mempunyai kecenderungan untuk memperpanjang proses penyelesaian. Sementara di sisi lain, Dewan Pers, pihak media yang diadukan, bahkan pengadu sendiri menginginkan penyelesaian yang cepat, jika perlu dengan hanya satu kali proses mediasi.

B. Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa

1. Dasar Hukum Pembentukan dewan Pers

Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kemudian Pasal 8 huruf (f) menegaskan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan turunan dari UUD 1945.

Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang memilih para pemimpinnya, mulai dari presiden sampai bupati, dan ketua Rukun Tetangga (RT). Rakyat juga berhak mengetahui apa yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah. Rakyat berhak pula melaksanakan pengawasan, kritik, dan memberikan saran terhadap pemerintah. Oleh sebab itu UU No. 40

Tahun 1999 tentang Pers ditegaskan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat.

Pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Sebagai konsekwensinya, melalui pers rakyat berhak mengetahui informasi yang berkaitan dengan publik atau rakyat. Hal ini akan menciptakan keterbukaan pada pemerintah sekaligus memungkinkan adanya alternatif pemikiran, saran, kritk, dan pengawasan kepada pemerintah dan para pihak yang terkait yang berujung pada terciptanya tatanan bernegara dan berbangsa yang demokratis.⁶⁴

Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan Dewan Pers yakni berdasarkan pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Diman dewan pers dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

2. Fungsi Dewan Pers dalam Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan pasal 15 ayat 2 undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dewan pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain,
- b. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers,

⁶⁴ Wina Armada Sukardi. *Kajian Tuntas UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. (Jakarta: Dewan Pers, 2013) hlm. 68

- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik,
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers,
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah,
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
- g. Mendata perusahaan pers.

Ketuju fungsi inilah yang senantiasa diemban oleh Dewan pers, melindungi kemerdekaan pers yang berarti menjaga agar kemerdekaan dapat tetap terjaga, sehingga berfungsi sesuai dengan tujuan diadakannya kemerdekaan pers. Ada tiga hal yang dapat mengurangi makna kemerdekaan pers; yang pertama, pihak ketiga yang berupaya mengurangi, meronrong atau menghilangkan kemerdekaan pers. Kedua, pihak ketiga yang mamakai kemerdekaan pers hanya sebagai topeng untuk kepentingan lain, dengan kata lain mereka adalah penumpang gelap kemerdekaan pers. Ketiga, pihak pers yang memakai kemerdekaan pers dengan tidak profesional dan tidak beretika.

Fungsi ke dua, dalam hal pemberian pengkajian, semua metode dan cara pengkajian memungkinkan untuk dilakukan oleh dewan pers. Dewan poers melakukan berbagai survei baik dilakukan sendiri maupun

bekerja sama dengan pihak lain termasuk dengan perguruan tinggi dan *media watch* (Pemantau Media). Dewan Pers juga melakukan pengkajian analisis strategis, termasuk untuk menentukan langkah mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang menjadi langkah jangka panjang.

Kemudian dalam menjalankan fungsi yang ketiga, yakni menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers berupaya melahirkan sebuah Kode Etik Jurnalistik yang dapat dipakai dan berlaku untuk semua wartawan. Dalam hal ini dewan pers telah memfasilitasi pembuatan Kode Etik Jurnalistik oleh 29 organisasi pers pada tanggal 14 Maret 2006 yang dapat berlaku untuk semua organisasi wartawan tersebut. Kemudian kesepakatan itu dituangkan kedalam peraturan Dewan Pers. Artinya, Dewan pers telah memiliki rujukan Kode Etik Jurnalistik yang dapat dipakai sebagai acuan nilai-nilai profesi. Kemudian Dewan Pers juga menerima dan memeriksa pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dari semua pihak. Menyelesaikan pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik⁶⁵ melalui Mekanisme Hak Jawab⁶⁶, atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Kemudian melakukan

⁶⁵ Kode Etik Jurnalistik Secara singkat dan umum dikenal dengan KEJ yang artinya, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) itu sendiri. Dan berlaku untuk kalangan jurnalis.

⁶⁶ Hak Jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik, hak setiap pihak yang merasa dirugikan nama baiknya oleh pemberitaan atau karya jurnalistik. Hak jawab hanya ditujukan kepada pers yang mempublikasikannya, bukan kepada pers yang lainnya.

pendidikan, pelatihan dan sosialisasi yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik. Namun, pada realitasnya peranan ini tidaklah berjalan dengan baik. Tercatat masih banyak pasal-pasal karet Haatzai Artikelen (delik kebencian) dalam KUHP digunakan aparat penegak hukum untuk memidana insan pers, antara lain: Pasal 154, 155, 156, 157, 160, dan 162 KUHP. Penggunaan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pers merupakan indikasi tidak dijalankannya Undang-undang Pers, atau dapat juga dikatakan sebagai penanda formal pemberangusan pers secara legal.

Dewan Pers melakukan advokasi terhadap pengadu dari kalangan media. Dalam hal ini, pengaduan atas tindakan semena-mena yang dilakukan baik di dalam internal perusahaan (hubungan kerja) ataupun ancaman kekerasan dari pihak lain seperti kelompok masyarakat dan aparat yang berwenang terhadap wartawan. Misalnya, pada 16 Juni 2008, Dewan Pers menerima pengaduan Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar (KJTKPM) terkait dengan sikap Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Sisno Adiwino, yang menurut KJTKPM, dalam berbagai kesempatan pidato menyatakan akan memidanakan wartawan jika terbukti bersalah. Selain itu, Sisno juga menyatakan masyarakat tidak mesti menggunakan Hak Jawab jika merasa dizalimi pers. Mereka bisa langsung melapor ke polisi.

Dewan Pers telah berupaya melakukan mediasi untuk membangun saling-pengertian antara Sisno Adiwino dan KJTKPM ini, dengan menggelar diskusi di Makassar. Namun, upaya dialog tersebut tidak

berhasil. Sengketa ini bahkan berlanjut ke pengadilan dengan menjadikan seorang aktivis KJTKPM, Upi Asmaradhana, menjadi tersangka. Dewan Pers mengirim surat ke Kapolri agar mengambil-alih atau menengahi persoalan pidana ini karena prosesnya diragukan berjalan adil. Sebab, pihak yang memeriksa Upi adalah kepolisian Makassar dimana Sisno menjadi Kapoldanya.

Dalam kaitan dengan advokasi untuk melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers acapkali memenuhi permintaan untuk menjadi saksi ahli (keterangan ahli) dalam perkara di pengadilan yang terkait dengan pers.

Sedikitnya selama tahun 2008 Anggota Dewan Pers menjadi saksi ahli dalam 18 perkara, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan. Dewan Pers memberikan kesaksian menyangkut ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terhadap liputan yang dipersengketakan. Selain diminta oleh kalangan pers, Dewan Pers juga diminta oleh lembaga pengadilan maupun aparat penegak hukum lainnya untuk menjadi saksi ahli. Terkait peran sebagai saksi ahli, keterlibatan Dewan Pers dalam kasus pengadilan terkait dengan karya jurnalistik semakin dikukuhkan dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. Sema ini mendorong hakim untuk mengundang saksi ahli dari Dewan Pers setiap kali menangani kasus yang terkait dengan delik pers. Berikut tabel penilaian Dewan Pers.

Tabel 11. Penilaian Dewan Pers

Penilaian	Frek	%
Terjadi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan	114	82,01
Tidak Terjadi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau UU Pers	13	9,35
Permohonan Klarifikasi	6	4,32
Bukan Kasus Kode Etik Jurnalistik atau UU Pers	3	2,16
Lain-lain	3	2,16
Total	139	100,00

Sumber: Arsip Dewan Pers

Keterangan: (Pengaduan langsung dan permintaan pendapat KPI) dalam satu pengaduan bisa lebih dari satu penilaian.

Tabel 12. Jenis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Jenis Pelanggaran KEJ	N	%
Berita Tidak Berimbang	41	30,77
Berita Mencampurkan Fakta dan Opini yang Menghakimi	35	24,48
Berita Tidak Mengandung uji Informasi/ Konfirmasi	30	20,98
Berita Tidak Akurat	14	9,79
Wartawan Tidak Profesional dalam Mencari Berita	5	3,50
Berita Tidak Jelas Narasumbernya	4	2,80
Berita Melanggar Asas Praduga Tidak Bersalah	4	2,80
Berita Tidak Menyembunyikan Identitas Korban Kejahatan Susila	4	2,80
Berita Tidak Menyembunyikan Identitas Pelaku Kejahatan di Bawah Umur	1	0,70
Lain-lain	5	3,50
Total	143	100,00

Sumber: Arsip Dewan Pers

Keterangan: dihitung dari jumlah total pengaduan yang mengandung pelanggaran KEJ pada Tabel IX, dalam satu pengaduan bisa lebih dari satu jenis pelanggaran

Jadi jika merujuk kepada data penyelesaian kasus di Dewan Pers, dapat dilihat betapa tingginya tingkat pelanggaran KEJ di pers Indonesia. Tentu saja ini memprihatinkan, ternyata kebebasan pers yang selama dinikmati masyarakat pers Indonesia, belum dibarengi dengan ketaatan terhadap KEJ yang dirumuskan oleh masyarakat pers itu sendiri. Kebebasan itu belum disempurnakan dengan perilaku etis terhadap obyek berita, sumber berita maupun kepada masyarakat. Perlu digarisbawahi, jika suatu berita melanggar KEJ, yang dirugikan sebenarnya bukan hanya obyek berita yang diperlakukan secara tidak berimbang atau menghakimi, atau sumber berita yang dipelintir pernyataannya, namun juga masyarakat pembaca atau pemirsa yang harus mengonsumsi informasi atau spekulatif atau tidak benar. Salah satu penjelasan dari tingginya angka pelanggaran KEJ adalah masalah utama dalam pers Indonesia hari ini, yakni kelemahan dalam hal verifikasi karena orientasi berlebihan media terhadap aspek kecepatan dalam menyampaikan informasi. Dengan kata lain, trend jurnalisme *hit and run* menyebabkan pers mengabaikan aspek kelengkapan dan kelayakan berita.

Persoalannya kemudian, obyek pemberitaan media umumnya adalah kasus-kasus yang berpotensi merugikan nama baik : kasus dugaan korupsi dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang

lain. Jurnalisme Indonesia hari ini kurang-lebih adalah “jurnalisme mengungkap skandal”. Karena yang diberitakan adalah kasus yang secara langsung menyangkut nama baik orang atau kelompok, keberimbangan, konfirmasi dan uji informasi mutlak dilakukan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka hampir pasti berita yang muncul akan merugikan atau menghakimi. Dapat dilihat, pengaduan yang masuk ke Dewan Pers bukan hanya tentang ketidakberimbangan berita, namun juga tuduhan fitnah atau kebohongan yang dilakukan media. Hal ini terjadi pada pemberitaan dugaan korupsi, perbuatan asusila, dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan kalangan pejabat publik. Juga pada berita-berita tentang perusahaan tertentu dalam hubungannya dengan isu lingkungan, ketenagakerjaan serta relasi dengan masyarakat sekitarnya. Namun Dewan Pers selalu menghindari diskursus tentang fitnah atau kebohongan media ini dan mencoba mengarahkan penelitian atau diskusi kepada diskursus tentang pelanggaran KEJ yang mungkin terjadi dan lebih ringan, misalnya saja berita yang tidak konfirmasi atau opini yang menghakimi. Sebab berita yang mengandung fitnah atau bohong sangat berat hukumannya bagi media dan sulit proses pembuktiannya. Opini yang menghakimi tentu saja pelanggaran KEJ yang serius dan sebagai konsekuensinya, pelanggaran KEJ jenis ini tidak cukup hanya diselesaikan melalui hak jawab, tetapi juga harus disertai dengan permintaan maaf media kepada yang diberitakan dan pembaca.

Tabel 13. Bentuk Penyelesaian

Bentuk Penyelesaian	Frek	%
Mediasi	40	28,7
Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR)	18	12,9
Surat menyurat	37	26,6
Komunikasi telephon	24	17,2
Pemberian Pendapat	15	10,7
Lainnya	5	3,5
Total	139	100,00

Sumber: Arsip Dewan Pers

Keterangan: (Pengaduan langsung dan permintaan pendapat KPI) dalam satu pengaduan bisa lebih dari satu penyelesaian

Tabel 13 menjelaskan bentuk penyelesaian atas pengaduan ke Dewan Pers. Antara Januari hingga September 2012, Dewan Pers melakukan 73 kali proses mediasi pengaduan KEJ. Pengaduan ke Dewan Pers umumnya dapat diselesaikan dengan satu kali proses mediasi, namun ada beberapa kasus yang bahkan membutuhkan 7 kali mediasi untuk menyelesaikannya. Perlu dijelaskan, proses mediasi Dewan Pers adalah proses mediasi dalam pengertian khusus. Dalam proses mediasi ini, fungsi Dewan Pers tidak murni sebagai mediator. Dewan Pers melakukan penilaian ajudikatif terhadap ada atau tidaknya pelanggaran KEJ, lalu merekomendasikan jalan penyelesaian. Namun sebelum melakukan penilaian ajudikatif ini, Dewan Pers memberikan kesempatan klarifikasi kepada kedua pihak : pengadu dan media/wartawan yang diadukan. Dalam proses mediasi ini, Dewan Pers menawarkan rekomendasi penyelesaian kepada kedua belah pihak. Jika rekomendasi

tidak diterima, maka proses mediasi ditutup dan kasus diserahkan kepada sidang pleno Dewan Pers.

Jadi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers akan dikeluarkan jika proses mediasi tidak menemui titik temu. PPR adalah keputusan final Dewan Pers tentang pelanggaran KEJ. Di samping itu, Dewan Pers juga menyelesaikan kasus pengaduan melalui surat-menyurat atau telephon. Proses surat-menyurat dilakukan jika pengaduan datang dari wilayah yang jauh dari Jakarta atau sulit dijangkau sehingga proses mediasi langsung secara teknis sulit dilakukan atau mahal biayanya. Maka penyelesaian dilakukan dengan suratmenyurat dengan pengadu dan teradu, yang biasanya dilengkapi dengan komunikasi telephon. Penyelesaian melalui komunikasi telephon juga didahulukan jika diperlukan proses penyelesaian yang bersifat segera dan tidak dapat ditunda-tunda. Ini terjadi misalnya pada media siber yang harus segera meralat beritanya atau menghapuskan komentar berita yang menimbulkan kontroversi atau merugikan pihak tertentu. Atau pada kasus-kasus pers di daerah berpotensi menimbulkan insiden kekerasan jika tidak ditangani dengan segera.

Meskipun penyelesaian permasalahan-permasalahan tentang pers atau sengketa yang timbul akibat dari pemberitaan media massa telah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, namun pada realitasnya masih saja banyak kasus-kasus pers yang diselesaikan dengan mengesampingkan UU Pers sebagai pedoman dasarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dewan pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan Media Massa adalah sebagai lembaga mediasi atas sengketa pemberitaan, dimana keputusannya sama dengan kedudukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sah, dan mengikat sebagai putusan akhir (final and binding), yang efektifitasnya bergantung kepada itikad baik Para Pihak yang bersengketa dalam sengketa pers tersebut. Karena berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan yang efektifitasnya bergantung pada itikad baik.
2. Fungsi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan pers adalah untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan Media Massa. Di

sini Dewan Pers berperan sebagai mediator jika terjadi sengketa, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana, antara pers dengan orang atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan media massa.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis menarik beberapa saran untuk ditindak lanjuti, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan kedudukan dewan pers sebagai bentuk peradilan khusus penyelesaian sengketa pemberitaan pers melalui pengaturan dalam Undang-undang Pers maupun dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman atau dalam Undang-undang tersendiri yakni dalam Undang-undang Badan Penyelesaian Sengketa Pers.
2. Fungsi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan pers saat ini perlu disosialisasikan kepada para penyelenggara negara, Guru dan masyarakat luas pada umumnya. Terutama sosialisasi tentang mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Mahendra. (2007) *Memorial A Moein MG, Standar Kompetensi Wartawan Suatu Keniscayaan*. Makassar: Makassar Press

Ariel Heryanto. (1994) *Pers Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

.Dewan Pers Periode 2010-2013, *Membangun Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional*. Jakarta: Dewan Pers

Dewan Pers. (2013). *Dewan Pers Periode 2013-2016*. Jakarta: Dewan Pers

Edy Susanto. (2010) *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Girsang Junifer. (2007). *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Hari Wiryawan.(2007). *Dasar-Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hikma Kusumaningrat. (2005). *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Indriyanto Seno Adji. (2008). *Hukum dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Diadit Media

Oemar Seno Adji. (1991). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta :
Penerbit Erlangga

Pius Abdillah. (2011). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Edisi Smart.
Surabaya: Arkola

Samsul Wahidin. (2010). *Hukum Pers, Cetakan kedua*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar

Takdir Rahmadi. (2010). *Mediasi, Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers

Tjipto Lesmana. (2005). *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers*.
Jakarta: Press

Wina Armada Sukardi. (2013). *Kajian Tuntas UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers

Peraturan - Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Tap MPR RI No. XVIII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusi

Website

Adi Prakosa. 2008. *Sistem Pers di Indonesia*. Dikutip pada laman website:

www.Google.comadiprakosa.blogspot.com/2008/01/sistem-pers-indonesia.html (Diakses pada hari Kamis, 3 Oktober 2013 pkl. 14.25 Wita)

Antara Sulsel. 2008. *Aji Makassar, Polda SulSel Sewenang-Wenang*.

Dikutip pada laman website:<http://www.antarasulsel.com/print/381/aji-makassar-polda-sulsel-sewenang-wenang> (diakses pada hari Senin, 16 September 2013, pkl. 00.14 Wita)

Aulia 2012. *Pers di Indonesia*. Dikutip pada laman website:

<http://edukasi.kompasiana.com/2012/09/26/pers-indonesia-dari->

masa-ke-masa-496777.html (diakses pada hari Selasa, 22 Oktober 2013 pkl. 14.50 Wita)

Ilham Hadi. 2013. *Pemberitaan Pers*. Dikutip pada laman website: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5152469d75905/pemberitaan-pers-dan-asas-praduga-tak-bersalah> (Diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2013. Pkl. 22.03 Wita)

Kurniawan. 2011. Pengetahuan tentang kebijakan informasi. Dikutip pada laman website: http://kurniawan-h-fisip08.web.unair.ac.id/artikel_detail-37121-kebijakan%20informasi-pengetahuan%20tentang%20kebijakan.html (diakses pada hari Rabu, 30 Oktober 2013 pkl 02.28 Wita)

Mariesa Giswandhani, 2013. *Sistem pers di Indonesia*. Dikutip pada laman website: <http://mgiswandhani.blogspot.com/2013/03/sistem-pers-indonesia.html> (diakses pada hari Kamis, 3 Oktober 2013 pkl. 13.45 Wita)

Mignolo. 2009. *Undang-Undang Pers*. Dikutip pada laman website: <http://catatancalonwartawan.wordpress.com/tag/undang-undang-pers/> (diakses pada hari Rabu, 23 Oktober 2013 pkl 06.45 Wita)

Otynunu 2012. *Media massa dan system pemerintahan*. Dikutip pada laman website: <http://otynunu.blogspot.com/2012/12/media-massa->

dan-sistem-pemerintahan.html (diakses pada hari Selasa, 22 Oktober 2013 pk. 12:50 Wita)

Sisi. 2008. *Sistem Komunikasi di Indonesia*. Dikutip pada laman website: <http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2008/05/sistem-komunikasi-indonesia.html> (Diakses pada hari Kaqmis, 10 Oktober 2013 pk. 15.07 Wita)

Vita Kent. 2010. *Perkembangan Sistem Pers di Indonesia*. Dikutip pada laman website: <http://vitakent.blogspot.com/2010/04/perkembangan-sistem-pers-di-indonesia.html> (diakses pada hari Kamis, 10 Oktober 2013 pk. 13.05 Wita)

Wikipedia. 2013. *Media Massa*. Dikutip pada laman website: [http://id.m.wikipedia.org/wiki/media massa](http://id.m.wikipedia.org/wiki/media%20massa) (diakses pada hari Kamis, 12 September 2013 pk. 21.13 Wita)

Wikipedia. 2013. *Dewan Pers*. Dikutip pada laman website: http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers (diakses pada hari Rabu, 23 Oktober 2013. Pkl 12.05 Wita)

Wikipedia. 2013. *Dewan Pers*. Dikutip pada laman website: http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers (diakses pada hari Rabu, 18 Februari 2013 pk. 00.12 Wita)